

SKRIPSI FINAL-AKMALIA NATASYA-102211010029.docx

by Student Turnitin

Submission date: 26-Aug-2025 11:33PM (UTC-0700)

Submission ID: 2736032083

File name: SKRIPSI_FINAL-AKMALIA_NATASYA-102211010029.docx (281.44K)

Word count: 32551

Character count: 198488

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PADA OPD
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SI)
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Indragiri*



OLEH:

AKMALIA NATASYA
NIM: 102211010029

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2025**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor) baik di Universitas Islam Indragiri maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya dan pendapat yang telah ditulis dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Tembilahan, Juli 2025
Yang Menyatakan

AKMALIA NATASYA
NIM. 102211010029

**1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM
INDRAGIRI PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

Diberikan kepada:

Nama Mahasiswa : Akmalia Natasya
Nim : 102211010029
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri
Hilir

Disetujui untuk diajukan pada Ujian *Oral Comprehensive* **1 Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri Tembilahan**

Tembilahan, Juli 2025
Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

IRA GUSTINA, SE., M.SI
NIDN. 103 108 8501

RIA FEBRINA, SE., M.Ak., Ak
NIDN. 102 102 8903

3 Mengetahui:
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri

NOVRIANI SUSANTI, SE., M. Ak., Ak
NIDN. 102 011 9001

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Akmalia Natasya
Nim : 102211010029
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri
Hilir

Telah **LULUS** Ujian Skripsi (*Oral Comprehensive*) yang diselenggarakan oleh
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam
Indragiri Tembilahan pada hari tanggal..... dengan nilai

TIM PENGUJI,

Nama Dosen NIDN.	Ketua	
Nama Dosen NIDN.	Sekretaris	
Nama Dosen NIDN.	Anggota	
Nama Dosen NIDN.	Anggota	

Mengesahkan

DEKAN

Ketua Program Studi

Dr. AHMAD RIFA'I, SE., M. Si NIDN.	NOVRIANI SUSANTI, SE., M. Ak., Ak NIDN. 102 011 9001
---------------------------------------	---

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PADA OPD
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Akmalia Natasya¹, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Indragiri
E-mail: natasyaakmalia5@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the Effect of Internal Control System, Implementation of Regional Financial Accounting System and Human Resource Competence on the Quality of Government Financial Reports in OPD of Indragiri Hilir Regency, with a sampling technique of Purposive Sampling and obtained from 34 OPDs in Indragiri Hilir Regency with 55 questionnaires returned from 68 questionnaires. The data used are primary data using questionnaires. This study uses descriptive statistics with a quantitative approach and multiple linear regression analysis techniques processed with SPSS software version 27. The results of the study indicate that the Internal Control System has a positive and significant effect on the Quality of Financial Reports, the Regional Financial Accounting System has a positive and significant effect on the Quality of Financial Reports, and Human Resource Competence has a positive and significant effect on the Quality of Financial Reports. Simultaneously, the Internal Control System, the Regional Financial Accounting System and Human Resource Competence have a positive and significant effect on the Quality of Government Financial Reports in OPD of Indragiri Hilir Regency with an Adjusted R Square value of 0.437, meaning that there is a 43.7% influence of the Government Financial Report Quality variable influenced by the Internal Control System, Regional Financial Accounting System and Human Resource Competence..*

Keywords: *Internal Control System, Implementation of Regional Financial Accounting System, Human Resource Competence, Quality of Financial Reports.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir, dengan teknik penentuan sampel yaitu *Purposive Sampling* dan diperoleh dari 34 OPD yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan 55 kuesioner yang kembali dari 68 kuesioner. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis *regresi linier berganda* yang diproses dengan software SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dan Kompetensi

Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara simultan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,437 artinya bahwa terdapat sebanyak 43,7% pengaruh variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan.

¹⁰ KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang dilimpahkannya, ⁴ kedua orang tua yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar sehingga penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan orang tua khususnya dalam penyusunan skripsi ini. ¹ Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ⁹ **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi ² Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir”**.

Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan kelulusan studi pada Program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri.

² Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara moril maupun materil, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Najamuddin, Lc, MA selaku Rektor Universitas Islam Indragiri.
2. Bapak Dr. Ahmad Rifa'i, SE., M. Si ² selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri.
3. Ibu Novriani Susanti, SE., M. Ak., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri.

4. Ibu Yusriwati, SE., M.Si selaku Penasehat Akademik Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri.
5. Ibu Ira Gustina, SE., M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu, memberikan saran-saran serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Ria Febrina, SE., M. Ak., Ak selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu, memberikan saran-saran dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Semua Pihak yang telah membantu, memberikan semangat serta doanya kepada penulis, yang tidak dapat penulis sampaikan satu per satu. Saya ucapkan terima kasih banyak.

Hanya doa dan ucapan syukur yang dapat penulis panjatkan, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan Teman-Teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Tembilahan, Juli 2025

AKMALIA NATASYA
NIM. 102211010029

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	19
1.3.1 Tujuan Penelitian	19
1.3.2 Manfaat Penelitian	19
1.4 Sistematika Penulisan	22
BAB II: TELAAH PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	24
2.1.1 Positive Accounting Theory (PAT)	24
2.1.2 Theory Agency	26
2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	31
2.1.4 Sistem Pengendalian Internal	42
2.1.5 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	47
2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia	52
2.2 Penelitian Terdahulu	58
2.3 Kerangka Pemikiran	69
2.4 Hipotesis	73
BAB III: METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	75
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	76
3.2.1 Lokasi Penelitian	76
3.2.2 Waktu Penelitian	77
3.3 Populasi dan Sampel	77

3.4	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	80
3.4.1	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)	80
3.4.2	Sistem Pengendalian Internal (X ₁)	81
3.4.3	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₂)	82
3.4.4	Kompetensi Sumber Daya manusia (X ₃).....	83
3.5	Pengumpulan Data.....	84
3.5.1	Metode Angket atau Kuesioner	84
3.5.2	Studi Pustaka	85
3.6	Analisa Data	85
3.6.1	Statistik Deskriptif.....	86
3.6.2	Uji Kualitas Data.....	86
3.6.3	Uji asumsi klasik	87
3.6.4	Uji Hipotesa	89
BAB IV: HASIL PENELITIAN		
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	92
4.1.1	Pembentukan OPD Kabupaten Indragiri Hilir	92
4.1.2	Karakteristik Responden	97
4.2	Hasil Penelitian	99
4.2.1	Hasil Uji Statistif Deskriptif.....	99
4.2.2	Uji Kualitas Data	100
4.2.3	Uji asumsi klasik.....	106
4.2.3.2	Uji Multikolonieritas	108
4.2.4	Uji Hipotesa	111
4.3	Pembahasan	117
4.3.1	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X ₁) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir	117
4.3.2	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₂) Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.....	119

4.3.3	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₃) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.....	121
4.3.4	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.....	122
2	BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	124
5.2	Saran	125
	DAFTAR PUSTAKA	127
	LAMPIRAN	134

5 DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Daftar Opini LKPD Kabupaten Indragiri Hilir	5
Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu	58
Tabel 3.1 : Kriteria Pengambilan Sampel	77
Tabel 3.2 : Daftar OPD Kabupaten Indragiri Hilir.....	78
Tabel 4.1 : Distribusi Penyebaran Kuesioner.....	94
Tabel 4.2 : Distribusi Kuesioner	97
Tabel 4.3 : Domografi Responden	98
Tabel 4.4 : Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	100
Tabel 4.5 : Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan	101
Tabel 4.6 : Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal	102
Tabel 4.7 : Hasil Uji Validitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	103
Tabel 4.8 : Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia	104
Tabel 4.9 : Hasil Uji Reliabilitas	105
Tabel 4.10 : Hasil Uji Normalitas	107
Tabel 4.11 : Hasil Uji Multikolonieritas.....	108
Tabel 4.12 : Hasil Uji Heteroskedasitas dengan Uji Glejser	109
Tabel 4.13 : Hasil Uji Regresi Linier Berganda	112
Tabel 4.14 : Hasil Uji Parsial (Uji-t).....	114
Tabel 4.15 : Hasil Uji Simultan (Uji-F)	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Pemikiran	72
Gambar 2: Normal P-P Plot.....	107
Gambar 3: Grafik Uji Heteroskedasitas	110

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Akmalia Natasya
Tempat/Tanggal Lahir : Sapat, 04 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswi
Alamat Lengkap : Jalan H. Arief Gg. H. Syarif
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Handphone : 085381424345
Email (*jika ada*) : natasyaakmalia5@gmail.com

Pendidikan

1. Tahun 2009 - 2015 : SDN 003 Tembilahan Hulu
2. Tahun 2015 - 2018 : SMPN 1 Tembilahan Hulu
3. Tahun 2018 - 2021 : SMKN 1 Tembilahan
4. Tahun 2021 - 2025 : Universitas Islam Indragiri

Pengalaman Organisasi

1. Tahun 2021 - 2022 : Sanggar Tuah Abdi
2. Tahun 2022 - 2023 : Sanggar Tuah Abdi

Minat dan Keahlian dimiliki

1. Saya memiliki minat yang tinggi dalam bidang akuntansi pemerintahan, khususnya terkait sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia.
2. Saya menguasai pencatatan transaksi keuangan, mengelompokkan, perhitungan dan menyajikan dalam bentuk laporan keuangan pelaporan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Hormat Saya

AKMALIA NATASYA

NIM.102211010029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi pasti membutuhkan pemerintahan yang baik. Pemerintah yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (<https://www.bpk.go.id/2024>).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi alat utama untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dan memastikan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, meskipun standar akuntansi telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan adanya penyajian yang disusun dengan baik dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber dana baik dalam penyajian informasi pelaporan finansial, realisasi anggaran dan penilaian kinerja finansial. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013, tentang laporan keuangan pemerintah menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah

yang baik harus mencakup empat karakteristik yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (<https://peraturan.bpk.go.id>).

Laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi prinsip keandalan dan relevansi agar dapat mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan produk dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang disusun diakhir periode merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Komponen laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan *Equitas* (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas laporan Keuangan (CALK) dimana penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) hal ini didukung oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (<https://dspace.uui.ac.id>).

Laporan keuangan pemerintah dihasilkan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah. Setelah menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak langsung dipublikasikan namun, diperiksa terlebih dahulu oleh Badan pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab dalam mengelola organisasi (<https://media.neliti.com>).

Kualitas laporan keuangan diberbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir masih sering menjadi sorotan. Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) dalam laporan auditnya sering menemukan permasalahan seperti ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar, lemahnya pengendalian internal hingga kurangnya kompetensi ⁵ Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi ¹¹ opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan, yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (<https://www.bpk.go.id/2023>).

Dalam ruang lingkup tata kelola keuangan pemerintahan yang menerapkan ¹ Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan memberikan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan layak, serta dapat dipertanggungjawabkan dan mengarahkan kepada ¹ penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bisa dikatakan cukup baik. Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di kabupaten Indragiri Hilir merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut (<https://www.bpk.go.id/2017>).

Dari <https://setda.inhilkab.go.id> yang berhasil diakses, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan Bupati berharap akan kembali meraih ¹ opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun 2021 yang sukses meraih ¹ opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya. Ketika ⁵ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan entitas tersebut disajikan wajar dan berkualitas.

Dari <https://mediacenter.inhilkab.go.id/login> yang berhasil diakses, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau pada tanggal 16 Juni 2023. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2022. Artinya, terhitung sejak 2016 sampai dengan 2022 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh (7) tahun berturut-turut.

Dari <https://mediacenter.inhilkab.go.id/login> yang berhasil diakses, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau bertempat di aula kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Riau, jalan sudirman. Sementara itu, kepala perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan mengapresiasi atas penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atas kerja kerasnya jajaran Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dapat menyelesaikan tepat pada waktunya, untuk itu diharapkan dengan keberhasilan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh delapan (8) kali

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Riau pada tanggal 22 Mei 2024 menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hilir, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya, Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan (8) kali berturut-turut sejak 2016 sampai 2023. Tabel opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri hilir dari 2016 sampai 2023, sebagai berikut:

Tabel 1.1: Daftar Opini LKPD Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Tahun	Opini
1	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
3	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
4	2019	Wajar Tanpa Pengecualian
5	2020	Wajar Tanpa Pengecualian
6	2021	Wajar Tanpa Pengecualian
7	2022	Wajar Tanpa Pengecualian
8	2023	Wajar Tanpa Pengecualian
9	2024	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: <https://ppid.inhilkab.go.id/>

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa opini yang diberikan tidak mengalami perubahan pada ⁵ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2016 sampai 2024 pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ³² memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 kali berturut-turut. Namun, ⁴ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan beberapa kelemahan terkait ¹ pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan (<https://ppid.inhilkab.go.id/>).

Hal ini telah diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah terkait, untuk mendorong pengembangan Sistem Pengendalian Internal yang memadai serta penerapan *Governance*, *Risk* dan *Compliance*. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap hasil pemeriksaan bermanfaat bagi upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemeriksaan serta sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan tata kelola keuangan daerah (<https://riau.bpk.go.id/>).

Temuan dari beberapa penelitian sebelumnya yang ¹⁵ menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang turut memengaruhi ¹⁶ kualitas laporan keuangan, seperti kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan yang dimaksud merujuk pada karakteristik relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman yang menjadi indikator utama dalam penyajian informasi keuangan pemerintah. Oleh

karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kembali secara komprehensif pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hilir (<https://media.neliti.com>).

Sistem pengendalian internal yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal yang baik mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2018). Pengendalian internal yang efektif dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan namun, implementasinya sering kali menghadapi kendala seperti, kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait (Arens dkk., 2020). Sistem pengendalian internal menjadi elemen fundamental dalam pengelolaan keuangan pemerintah termasuk pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir (www.bpk.go.id).

Sistem pengendalian internal dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kendala laporan keuangan pemerintah daerah. Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir, kelemahan dalam salah satu atau beberapa komponen dapat mengakibatkan ketidaktepatan pencatatan keuangan seperti, kesalahan klasifikasi anggaran dan kurangnya kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan (www.bpk.go.id).

Keterkaitan sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pada Kabupaten Indragiri Hilir yang telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama delapan (8) tahun berturut turut dari 2016 sampai 2023 yang menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat sistem pengendalian internal. Namun, laporan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) juga masih mencatat kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti kurangnya dokumentasi atas proses pengendalian dan pengawasan (<https://media.neliti.com>).

Sistem pengendalian internal dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dianalisis melalui lima indikator utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen serta seluruh pegawai terhadap pentingnya pengendalian internal dalam menjalankan tugas pemerintahan (www.bpk.go.id).

Pada beberapa OPD di Kabupaten Indragiri Hilir, masih ditemukan lemahnya komitmen pimpinan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas yang konsisten, yang dapat memengaruhi efektivitas pengendalian. Penilaian risiko belum sepenuhnya dilaksanakan secara sistematis, sehingga potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaporan keuangan sulit diantisipasi lebih awal. Aktivitas pengendalian seperti prosedur otorisasi, verifikasi, dan pemisahan tugas sering kali belum berjalan optimal, mengakibatkan lemahnya sistem pencegahan

dan deteksi kesalahan. Di sisi lain, sistem informasi dan komunikasi internal belum sepenuhnya mendukung aliran informasi yang tepat waktu dan akurat antar unit kerja, yang dapat berdampak pada keterlambatan atau kesalahan pelaporan. Terakhir, fungsi pemantauan pengendalian internal belum terlaksana secara berkelanjutan, yang menyebabkan ketidaktertiban dalam tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun opini WTP telah diraih, implementasi pengendalian internal secara substansial masih memerlukan perbaikan agar kualitas laporan keuangan benar-benar dapat diandalkan (www.bpk.go.id).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual juga menjadi tantangan. Regulasi yang mengatur standar pelaporan keuangan berbasis akrual di sektor pemerintah pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam konteks tersebut, arah indikator penerapan SAP mencakup tiga aspek penting, yaitu pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Pertama, pencatatan mengacu pada proses sistematis dalam mencatat seluruh transaksi keuangan secara kronologis dan berdasarkan asas akuntansi akrual, yang bertujuan agar seluruh kegiatan keuangan daerah terdokumentasi secara akurat dan andal. Kedua, pengikhtisaran adalah tahapan dalam sistem akuntansi yang menyusun data dari pencatatan transaksi ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan terstruktur, seperti buku besar, neraca saldo, dan laporan periodik lainnya (<https://riau.bpk.go.id>).

Proses ini sangat menentukan keterbandingan dan keterpahaman informasi keuangan. Ketiga, pelaporan adalah hasil akhir dari sistem akuntansi yang

menyajikan laporan keuangan secara komprehensif kepada pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip relevansi, keandalan, dan dapat dibandingkan, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Oleh karena itu, penerapan SAP yang baik melalui tiga indikator ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. Banyak daerah, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi kesulitan dalam menghadapi sistem ini baik karena keterbatasan infrastruktur maupun kurangnya pelatihan yang memadai bagi para pengguna sistem tersebut, serta masih ditemukan kesalahan administrasi keuangan yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan (<https://riau.bpk.go.id>).

Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berbasis akrual, terdapat beberapa hal yang menunjukkan keberhasilan seperti, Kabupaten Indragiri Hilir telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik memberikan peningkatan dalam aspek penyajian dan keandalan data keuangan (<https://riau.bpk.go.id>).

Meskipun laporan keuangan daerah berhasil memperoleh opini WTP secara berturut-turut, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas penerapan SAP di tingkat operasional. Masih ditemukan keterlambatan penyusunan laporan dan ketidaksesuaian klasifikasi akun yang dapat mengganggu kualitas informasi keuangan yang disajikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan administratif dalam meraih opini audit belum tentu mencerminkan

penerapan sistem akuntansi yang baik di seluruh OPD. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi harus benar-benar dimaknai sebagai proses berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada hasil akhir laporan, tetapi juga pada keakuratan dan keandalan proses pencatatan serta transparansi informasi yang dihasilkan. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana penerapan sistem ini memengaruhi kualitas laporan keuangan secara nyata, bukan hanya dari sisi formalitas semata (<https://warta.bpk.go.id>).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Pegawai memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup dibidang akuntansi serta keuangan memainkan peran kunci dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas namun, kenyataan bahwa banyak daerah masih menghadapi masalah dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mereka, baik karena keterbatasan anggaran maupun kurangnya program pelatihan berkelanjutan (Serdamayanti, 2017).

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) memainkan peran penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan, pengetahuan profesional para pegawai di bidang keuangan, keterampilan teknis sumber daya manusia yang bertugas dalam pengelolaan keuangan. Kabupaten Indragiri Hilir yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya peran sumber daya manusia yang cukup baik dalam penyusunan laporan keuangan karena pegawai keuangan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) telah mengikuti pelatihan teknis terkait pengelolaan akuntansi berbasis akrual (<https://bkd.inhilkab.go.id/>).

Kompetensi sumber daya manusia dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu pengetahuan, keahlian dan perilaku. Pengetahuan mengacu pada pemahaman pegawai terhadap prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, regulasi keuangan daerah, serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di beberapa OPD Kabupaten Indragiri Hilir, masih ditemukan aparatur yang belum sepenuhnya menguasai aturan teknis penyusunan laporan keuangan, yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan maupun pelaporan. Keahlian mencerminkan kemampuan teknis dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut ke dalam sistem keuangan daerah, seperti mengoperasikan aplikasi keuangan, menyusun jurnal, serta merekonsiliasi data (<https://elibrary.unikom.ac.id>).

Kurangnya pelatihan dan pembaruan kompetensi teknis sering kali menjadi kendala dalam memastikan keakuratan data. Sementara itu, perilaku mencakup sikap, etika, dan tanggung jawab pegawai dalam menjalankan tugasnya. Pegawai yang memiliki integritas tinggi akan lebih cermat, teliti, dan taat aturan, yang pada akhirnya mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal dan transparan. Dengan demikian, ketiga indikator ini saling berkaitan dan harus dimiliki secara seimbang agar SDM mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas (<https://www.researchgate.net>).

Secara keseluruhan, kualitas laporan keuangan pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir dipengaruhi oleh keberhasilan dalam penerapan sistem pengendalian internal dibutuhkan agar mempermudah

dalam menemukan atau menganalisis permasalahan yang ada, sistem akuntansi keuangan daerah yang akuntabel, bersistem dan terorganisir akan mampu memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia dengan integrasi yang baik menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama beberapa tahun berturut-turut, kualitas laporan keuangan dari sisi substansi masih menjadi pertanyaan. Hal ini terlihat dari beberapa temuan audit dan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal belum sepenuhnya berjalan efektif, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah masih menghadapi kendala teknis dan administratif, serta kompetensi sumber daya manusia belum merata dalam penguasaan akuntansi pemerintahan. Padahal, kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh keandalan proses pengendalian, akuntabilitas sistem pencatatan, serta kapabilitas aparatur dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan secara tepat.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah capaian opini WTP tersebut benar-benar mencerminkan kualitas laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, dan sejauh mana ketiga variabel independen tersebut memengaruhi kualitas laporan keuangan secara nyata. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi, dan kompetensi SDM

terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi tata kelola keuangan pemerintah daerah ke depan.

Dalam penelitian Rahayu & Kanita (2022), dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022)”, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem pengendalian Internal pada OPD berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di OPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 (Rahayu & Dewi Kanita, 2022).

Hal ini menunjukkan tingginya kualitas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan teknologi informasi tidak serta-merta meningkatkan kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan artinya semakin baik sistem pengendalian intern dalam suatu OPD semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, perlunya pelatihan dan sosialisasi lebih lanjut terkait penerapan akuntansi berbasis akrual dan pemanfaatan teknologi informasi agar dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan (Rahayu & Kanita, 2022).

Secara parsial variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan Daerah Pada OPD Provinsi DKI Jakarta, hal ini menunjukkan meskipun penerapannya sudah sangat

baik, tetapi belum cukup untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tanpa adanya faktor lain yang mendukung. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada OPD Provinsi DKI Jakarta, hal ini menunjukkan meskipun pemanfaatannya tergolong sangat baik, tetapi belum cukup untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan secara langsung ditemukan bahwa kurangnya jadwal pemeliharaan teknologi menjadi kendala dalam optimalisasi sistem. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada OPD Provinsi DKI Jakarta, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan control dalam pencatatan serta pelaporan keuangan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan (Rahayu & Kanita, 2022).

Dalam penelitian Gustina (2021), dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir”, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal yang baik belum tentu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak hanya dinilai dari efektivitas pengendalian internalnya saja, sehingga aparatur pemerintah harus mampu memenuhi aspek-aspek lain untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Gustina, 2021).

Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini

menunjukkan bahwa semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang menjadi suatu informasi yang disajikan membutuhkan sebuah sistem dalam penyusunannya (Gustina, 2021).

Dalam penelitian Binawati & Nindyaningsih (2022), dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan sistem akuntansi keuangan daerah telah dilakukan dengan baik untuk mendukung dan memaksimalkan sistem (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia telah baik dilakukan sehingga, berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah dilakukan dengan baik, mampu meningkatkan kemampuan dalam pembuatan laporan keuangan keuangan (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi telah baik dilakukan tetapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada

kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

Penelitian ini berfokus untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta untuk mengevaluasi pengaruh sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir.

Variabel sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia ini dipilih karena variabel-variabel ini mempengaruhi sejauh mana kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dijaga terkait dengan transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipilih karena variabel independen yaitu, sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia dan variabel dependen yaitu, kualitas laporan keuangan pemerintah terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang memungkinkan penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan pengelolaan keuangan.

Ketidakkonsistenan atau perbedaan pendapat dari penelitian terdahulu mengenai penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah yang menyatakan variabel

independen yaitu, sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan variabel independen tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti kembali dengan judul “**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir**”.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk memperoleh pengetahuan mengenai perumusan masalah yang telah disampaikan, yaitu :

1. Untuk mengetahui secara empiris Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui secara empiris Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui secara empiris Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Untuk mengetahui secara empiris Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian untuk menyelidiki keadaan, alasan, konsekuensi terhadap suatu keadaan tertentu, memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang suatu masalah atau fenomena, baik dalam konteks teori maupun praktik.

Penelitian memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memecahkan masalah praktis yang dihadapi (Sugiyono, 2018). Ada dua kategori manfaat penelitian yaitu teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang penelitian yang relevan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir, serta juga diharapkan sebagai manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran. Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2018)

Penelitian ini dapat memperkaya teori akuntansi, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, seperti transparansi, akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang baik. Kualitas laporan pemerintah mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Teori Pengendalian Internal (Arens dkk., 2020)

Menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif membantu dalam meningkatkan keandalan pelaporan keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan serta dapat meminimalkan risiko kesalahan yang memiliki peran penting dalam proses pelaporan keuangan. Penelitian ini menguji secara

empiris relevansi teori ini dalam konteks pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Teori Akuntansi Berbasis Akrua (Mardiasmo, 2018)

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mendukung teori akuntansi berbasis akrual dengan mengkaji penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan yang andal, relevan, transparan dan akuntabel. Sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif merupakan landasan untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

d. Teori Kompetensi Sumber Daya Manusia (Serdamayanti, 2017)

Menurut teori ini, kompetensi sumber daya manusia yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap adalah kunci untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Penelitian ini mendukung teori tersebut dengan mengevaluasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kinerja organisasi terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis digunakan untuk memberikan solusi nyata untuk masalah yang dihadapi di lapangan dan menghasilkan rekomendasi yang dapat di implementasikan oleh pihak terkait untuk memperbaiki situasi tertentu (Sugiyono, 2018). Manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penulis dapat menyerap ilmu secara langsung pada bidang yang diteliti serta dapat membantu mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi sebagai

pengalaman diri sendiri serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang penelitian dan ilmu pengetahuan yang didapat selama di bangku kuliah di aplikasikan.

b. Bagi Dunia Pendidikan/Akademis

Dapat bermanfaat untuk memahami teori sebagai bahan referensi dan tambahan informasi bagi Mahasiswa dan Mahasiswi dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Dapat membantu pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah, dengan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem pengendalian internal, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian umumnya mencakup beberapa bagian utama seperti, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, pembahasan dan penutup. Sistematika penulisan ini memberikan alur logis dan memudahkan pembaca memahami isi penelitian (Sugiyono, 2018).

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang berbagai Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang Desain Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Populasi Dan Sampel Penelitian, Prosedur Pengumpulan Data, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, serta Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pengumpulan data, hasil analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka sebagai lembar untuk menuliskan identitas sumber referensi yang sudah digunakan dalam menjalankan penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Positive Accounting Theory (PAT)

Positive Accounting Theory (PAT) dikembangkan pada tahun 1970-an dan 1980-an sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memahami dan menjelaskan praktik akuntansi yang diterapkan oleh entitas. *Positive Accounting Theory* (PAT) merupakan cabang dari akuntansi positif yang berfokus pada penjelasan dan prediksi perilaku organisasi dan individu terkait kebijakan akuntansi. Lahirnya *Positive Accounting Theory* (PAT) pada 1970-an muncul pendekatan baru yang berfokus pada penjelasan perilaku nyata, bukan hanya memberi pedoman normatif.

Kontribusi Watts dan Zimmerman (1978), dalam artikel mereka dengan judul “*Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards*”, memperkenalkan konsep dasar *Positive Accounting Theory* (PAT). Mereka menyatakan bahwa kebijakan akuntansi dipilih oleh manajemen berdasarkan insentif ekonomi, kontrak dan tekanan politik. Fokus mereka menjelaskan mengapa entitas memilih kebijakan akuntansi tertentu dan bagaimana faktor eksternal seperti regulasi dan pajak mempengaruhi pilihan.

Pengembangan dan penerapan *Positive Accounting Theory* (PAT) pada tahun 1980-an menjadi kerangka utama dalam penelitian akuntansi empiris. Peneliti mulai menggunakan data historis untuk menguji prediksi *Positive*

Accounting Theory (PAT) tentang pilihan kebijakan akuntansi. Dalam Watts & Zimmerman (1986), teori dasar yang melandasi *Positive Accounting Theory* (PAT), yaitu:

1. *Agency Theory*, menjelaskan hubungan antara manajemen dan pemilik serta bagaimana konflik kepentingan mempengaruhi kebijakan akuntansi.
2. *Political Cost Theory*, menguraikan bagaimana tekanan politik mempengaruhi entitas dalam memilih metode akuntansi tertentu.
3. *Bonus Plan Hypothesis*, menjelaskan bahwa manajemen cenderung memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba untuk memenuhi target bonus.

Aplikasi *Positive Accounting Theory* (PAT) di era modern pada tahun 2000-an perkembangan empiris *Positive Accounting Theory* (PAT) menjadi kerangka umum untuk penelitian akuntansi di berbagai bidang, seperti pelaporan keuangan, pengendalian internal dan audit. Fokus pada praktik akuntansi yang dipengaruhi oleh globalisasi, teknologi dan perubahan regulasi. *Positive Accounting Theory* (PAT) mulai diterapkan untuk menjelaskan praktik akuntansi di sektor publik, termasuk tata kelola keuangan pemerintah.

Positive Accounting Theory (PAT) muncul sebagai tanggapan terhadap kelemahan pendekatan normatif, dengan fokus pada penjelasan dan prediksi praktik akuntansi berdasarkan insentif ekonomi dan kontrak. *Positive Accounting Theory* (PAT) terus berkembang sebagai landasan penting dalam penelitian akuntansi empiris, meskipun menghadapi kritik karena kurangnya fokus pada aspek sosial dan etika hingga kini, *Positive Accounting Theory* (PAT) tetap

menjadi teori yang relevan untuk memahami perilaku akuntansi dalam konteks organisasi modern.

Penerapan *Positive Accounting Theory* (PAT) dalam penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat kerangka teori yang mendukung analisis empiris hubungan antara sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Positive Accounting Theory* (PAT) pada penelitian ini relevan karena teori ini menyediakan landasan untuk menjelaskan dan memprediksi bagaimana sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Positive Accounting Theory* (PAT) dapat menghasilkan wawasan empiris yang mendukung perbaikan tata kelola keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir.

2.1.2 Theory Agency

2.1.2.1 Pengertian Theory Agency

Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pihak prinsipal (pemilik wewenang atau pemberi mandat) dengan pihak agen (penerima mandat) dalam sebuah kontrak kerja, di mana agen diberi kewenangan untuk menjalankan tugas atas nama prinsipal. Dalam konteks sektor publik, pemerintah (agen) bertindak atas nama masyarakat (prinsipal) untuk mengelola keuangan negara dan menyajikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa

masalah keagenan dapat muncul ketika terdapat asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, yang dapat menyebabkan penyimpangan, manipulasi informasi, atau ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan dan pengendalian, seperti sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi, serta peningkatan kompetensi SDM, guna meminimalisasi risiko keagenan dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pelaporan keuangan. Dengan demikian, *agency theory* menjadi landasan penting dalam menelaah bagaimana faktor-faktor internal organisasi pemerintah dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan yang menjadi hak publik untuk diketahui.

Agency Theory, menjelaskan hubungan antara manajemen dan pemilik serta bagaimana konflik kepentingan mempengaruhi kebijakan akuntansi. Keterkaitan adanya teori agensi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan, dimana pemerintah bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (agen) maka berkewajiban untuk mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pihak yang memiliki kepentingan sebagai pengguna informasi yang dimana bertindak sebagai principal untuk menilai akuntabilitas dan memutuskan kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Hubungan antara pemerintah dan pemilik kepentingan sebagai pengguna informasi laporan keuangan dapat dikaitkan adanya hubungan keagenan.

Teori keagenan (*Agency Theory*) memiliki kaitan yang erat dengan seluruh variabel dalam penelitian ini, yaitu sistem pengendalian internal, penerapan sistem

akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan. Dalam perspektif teori ini, pemerintah daerah sebagai agen memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya publik dan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (prinsipal). Untuk mengurangi risiko terjadinya asimetri informasi dan perilaku oportunistik, diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif agar proses pelaporan keuangan berjalan sesuai aturan dan dapat dipercaya.

Selain itu, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan standar (SAP) menjadi alat formal yang digunakan agen untuk menyajikan informasi keuangan secara transparan dan akuntabel. Sementara itu, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor pendukung utama dalam menjalankan tugas pelaporan, karena agen yang kompeten akan cenderung bekerja secara profesional dan taat aturan. Semua variabel tersebut pada akhirnya memengaruhi kualitas laporan keuangan yang menjadi dasar masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah. Dengan demikian, *agency theory* memberikan kerangka teoritis yang kuat dalam menjelaskan pentingnya tata kelola yang baik demi menjaga hubungan yang sehat antara agen dan prinsipal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu & Kanita (2023), berfokus pada pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Meskipun teori *agency* tidak disebutkan secara eksplisit dalam jurnal ini, kerangka pikir yang digunakan sangat relevan dengan prinsip-prinsip dalam teori *agency*. Dalam teori *agency*, pemerintah daerah

(sebagai agen) memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat (sebagai prinsipal). Kualitas laporan keuangan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal. Untuk menjaga akuntabilitas ini, agen harus memiliki sistem yang dapat dipercaya dan diawasi, seperti Sistem Pengendalian Internal (SPI), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Rahayu & Kanita, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial, hanya Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Teknologi Informasi (TI) tidak signifikan. Temuan ini mencerminkan bagaimana mekanisme pengawasan internal berperan penting dalam hubungan keagenan untuk memastikan informasi keuangan yang disajikan benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori *agency* yang menekankan pentingnya pengendalian dan pengawasan guna meminimalkan asimetri informasi dan memastikan agen bertindak sesuai kepentingan principal (Rahayu & Kanita, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gustina (2021), secara tidak langsung berlandaskan pada kerangka berpikir teori keagenan (*agency theory*), di mana pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang berkewajiban menyusun laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai prinsipal. Dalam konteks ini, kualitas laporan keuangan menjadi instrumen utama dalam mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dari

hasil penelitiannya, ditemukan bahwa ⁷ sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sementara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan. Temuan ini sejalan dengan teori *agency* yang menekankan pentingnya mekanisme pelaporan dan sistem informasi yang akuntabel dalam mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Meskipun pengendalian internal merupakan bagian dari mekanisme pengawasan, efektivitasnya dapat berbeda tergantung pada kualitas implementasi dan kompetensi sumber daya manusia yang menjalankannya (Gustina, 2021).

Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa kualitas informasi keuangan yang dilaporkan oleh agen (pemerintah) sangat dipengaruhi oleh struktur sistem akuntansi yang diterapkan, bukan hanya dari sisi formalitas pengendalian, tetapi dari substansi bagaimana informasi tersebut dicatat, diringkaskan, dan disajikan secara tepat dan dapat dipahami. Oleh karena itu, teori *agency* menjadi landasan yang relevan dalam menjelaskan pentingnya penerapan sistem yang transparan dan profesional agar laporan keuangan benar-benar mencerminkan kinerja pemerintah sebagai agen publik (Gustina, 2021).

Penelitian oleh Binawati & Nindyaningsih (2022), secara tidak langsung mengacu pada kerangka teori *agency*, yang menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen (pengelola keuangan daerah) dan masyarakat sebagai prinsipal (pemilik wewenang). Dalam konteks ini, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas penggunaan sumber

daya yang dikuasainya. Teori *agency* menjadi relevan karena dalam penyusunan laporan keuangan, terdapat potensi asimetri informasi dan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme tata kelola dan pengendalian, seperti: penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai alat formal untuk menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kompetensi sumber daya manusia untuk memastikan kemampuan teknis dan integritas aparatur penyusun laporan, sistem pengendalian intern untuk mencegah kecurangan dan kesalahan pelaporan, dan Pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan keandalan informasi keuangan (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

²⁴ Penelitian ini membuktikan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, baik secara parsial maupun simultan. Hasil ini konsisten dengan prinsip dasar teori *agency* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam hubungan keagenan. Dengan penguatan sistem dan kompetensi, risiko informasi yang menyesatkan dapat ditekan, sehingga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah dapat ditingkatkan (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2017), tentang laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan yang disajikan oleh suatu

Entitas atau Organisasi. Adapun tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan suatu informasi mengenai posisi keuangan yang akan digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi. Laporan Keuangan juga digunakan untuk menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Kualitas laporan keuangan adalah kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai laporan keuangan (Sofyan Syafri Harahap, 2013). Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Bastian, 2010).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Rasdianto, 2013). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang disusun dengan prinsip akrual dan memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan ini harus mampu menyajikan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas pemerintahan secara wajar.

Menurut Watts & Zimmerman (1986), PAT menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun tidak hanya untuk mencerminkan kondisi keuangan secara objektif, tetapi juga dipengaruhi oleh motivasi manajer atau agen, seperti kepentingan politik, kontraktual, atau kompensasi. Kualitas laporan keuangan dalam kerangka PAT dapat dipertahankan melalui mekanisme tata kelola yang baik seperti sistem pengendalian internal, pengawasan legislatif, dan transparansi. Menurut Jensen & Meckling (1976), Dalam teori keagenan, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban dari agen (pemerintah) kepada prinsipal (masyarakat). Laporan keuangan yang berkualitas membantu mengurangi asimetri informasi dan meminimalisir konflik kepentingan antara kedua pihak. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

2.1.3.2 Indikator Laporan Keuangan

Menurut Mursyidi (2013), Indikator laporan keuangan yang berkualitas mencakup dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang berkualitas juga harus menyajikan informasi yang lengkap, mencakup harta, utang, modal, pendapatan, kewajiban, dan beban perusahaan. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Dapat Dipahami (*Understandability*), Laporan keuangan harus disajikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang akuntansi dan bisnis.

2. Relevan (*Relevance*), Informasi dalam laporan keuangan harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pengguna. Informasi yang relevan dapat membantu pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta mengonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi mereka.
3. Keandalan (*Reliability*), Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari kesalahan material dan penyajian yang menyesatkan. Laporan keuangan harus jujur dalam merepresentasikan transaksi dan peristiwa yang terjadi, serta dapat diverifikasi oleh pihak lain.
4. Dapat Dibandingkan (*Comparability*), Laporan keuangan harus memungkinkan pengguna untuk membandingkan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas dari waktu ke waktu dan dengan entitas lain. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi tren dan pola yang signifikan.

Selain karakteristik tersebut, laporan keuangan juga harus memenuhi persyaratan penyajian yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), seperti penyajian secara wajar, kepatuhan terhadap standar akuntansi, kelangsungan usaha, dasar akrual, materialitas, agregasi, saling hapus, frekuensi pelaporan, informasi komparatif, dan konsistensi penyajian.

2.1.3.3 Tujuan Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 tahun 2018, mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

1. Memberikan segala macam informasi keuangan selama kurun waktu tertentu (periode akuntansi/satu tahun), misalnya informasi tentang :
 - a. Perubahan aset/harta, utang, dan modal (bertambah, berkurang, atau tetap).
 - b. Rasio pertumbuhan ekonomi perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan laporan keuangan per tahun.
 - c. Jenis-jenis aset atau harta yang dimiliki, misalnya kendaraan, tanah, gedung, serta uang kas (tunai), jenis-jenis utang bila ada, termasuk juga jenis-jenis modal, misalnya modal saham dan nonsaham, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan.
2. Memberikan penilaian tentang kondisi perusahaan pada saat itu, misalnya apakah kondisi perusahaan termasuk sehat atau tidak bila jumlah utang melebihi jumlah aset atau sebaliknya.
3. Membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat putusan penting setelah membaca dan menganalisis laporan keuangan.

Secara keseluruhan, laporan keuangan memberikan informasi komprehensif tentang posisi keuangan perusahaan, termasuk perubahan dalam aset, utang, dan modal, serta memberikan dasar untuk analisis pertumbuhan ekonomi dan evaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan (<https://pustaka.ut.ac.id>).

2.1.3.4 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Penjelasan mengenai jenis-jenis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Neraca

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012), neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva (aset), liabilitas (kewajiban), dan ekuitas (modal) suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Dengan kata lain, neraca memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki perusahaan (aset), apa yang menjadi kewajibannya (liabilitas), dan apa yang menjadi hak pemilik (ekuitas) pada saat laporan tersebut dibuat. Unsur-unsur yang ada dalam neraca antara lain sebagai berikut :

a. Aktiva (Aset)

Aset/aktiva/harta adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Aset dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- 1) Aset lancar adalah aset yang memiliki umur kurang dari satu tahun atau aset yang mudah diuangkan dan dicairkan, misalnya : kas, piutang, wesel tagih, perlengkapan, beban dibayar dimuka, persediaan.
- 2) Investasi jangka panjang adalah aset yang memiliki manfaat ekonomis lebih dari satu tahun yang tidak dipergunakan untuk kegiatan ekonomi atau operasional perusahaan, misalnya bentuk yang dibiarkan begitu saja, saham dan obligasi.

- 3) Aset tetap adalah aset yang memiliki manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, yang secara umum dibedakan menjadi berwujud dan tidak berwujud.

b. Kewajiban (Liabilitas)

Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- 1) Kewajiban jangka pendek adalah utang atau kewajiban yang memiliki umur (atau harus dilunasi) dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, yang meliputi : utang usaha, wesel bayar, beban yang masih harus dibayar.
- 2) Kewajiban jangka panjang adalah utang atau kewajiban memiliki umur (atau harus dilunasi) lebih dari satu tahun, meliputi: obligasi, hipotik, dan utang bank.

c. Modal (Ekuitas)

Modal adalah aset bersih yang didapatkan dari semua aset dengan kewajiban.

2. Laporan Laba-Rugi

Menurut Kasmir (2018), Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita perusahaan. Laporan laba rugi pada dasarnya hanya memuat dua hal, yaitu total pendapatan dan total beban.

- a. Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi (bertambahnya modal/aset atau menurunnya kewajiban) yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan, misalnya penjualan, pemberian jasa pada klien, dan pendapatan dari kegiatan non operasional seperti penjualan surat berharga atau aset tetap.
- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi (penurunan modal aset atau bertambahnya kewajiban) karena aktivitas operasional perusahaan, misalnya beban gaji karyawan, dan aktivitas non operasional perusahaan, misalnya beban penyusutan.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal menurut Agus Purwaji (2016), adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Laporan perubahan modal adalah laporan mengenai posisi modal organisasi atau perusahaan pada saat tertentu. Laporan perubahan modal dibuat setelah pembuatan laporan laba rugi. Laporan perubahan modal berisi modal awal ditambah dengan laba. Namun, bila rugi berarti dikurangi dengan jumlah rugi.

4. Laporan Arus Kas

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 2), Laporan arus kas adalah laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Perusahaan atau organisasi perlu mengetahui jumlah kas yang benar-benar tersedia pada perusahaan. Kegiatan perusahaan terkait dengan masuk dan keluarnya kas terdiri atas tiga kegiatan, yaitu :

- a. Aktivitas operasi, Arus kas dari kegiatan operasi antara lain dapat berupa arus kas dari transaksi penjualan, pembayaran ke pemasok, karyawan, bunga beban operasional lainnya dan pajak penghasilan. Aktivitas investasi, Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan arus kas masa depan.
- b. Aktivitas pendanaan, Arus kas aktivitas pendanaan, dapat berupa penerimaan kas dari saham dan obligasi, pembayaran deviden, serta pelunasan pinjaman.

2.1.3.5 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintah

⁶ Laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), disusun berdasarkan penerapan akuntansi basis akrual ¹⁰ berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing laporan:

1. ⁸ Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja negara/daerah selama periode tertentu, dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
2. Laporan Operasional (LO): Menyajikan informasi mengenai seluruh pendapatan dan beban pemerintah selama periode pelaporan.

3. ⁴ Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL): Menunjukkan perubahan saldo anggaran lebih dari suatu periode ke periode berikutnya, yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja.
 4. Neraca: Menunjukkan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu, meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
 5. Laporan Arus Kas (LAK): Menunjukkan aliran masuk dan keluar kas dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan.
 6. ⁴ Laporan Perubahan Ekuitas: Menunjukkan ⁶ perubahan ekuitas pemerintah selama ⁶ periode pelaporan.
 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Memberikan penjelasan rinci dan informasi tambahan mengenai ¹ penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- Laporan-laporan ¹ ini disusun secara berjenjang dan saling terkait, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah.

⁴ 2.1.3.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Dalam Setyowati, ⁵ dkk. (2016), faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan instansi, yaitu :

1. ² Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- Pemanfaatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005, tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah suatu sistem mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan

dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, sedangkan informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki makna kompetensi yang mengandung bagian kepribadian mendalam dan melekat pada seseorang dalam perilaku yang dapat diprediksi di berbagai keadaan serta tugas pekerjaan yang dapat diukur dari kriteria yang sudah ditetapkan atau standar yang digunakan.

3. Peran Internal

Peran internal auditing merupakan suatu aktivitas independen, keyakinan objektif, konsultasi yang dirancang untuk memberikan tambah dan mengingatkan operasi organisasi serta membantu organisasi mencapai tujuan dengan menerapkan pendekatan yang sistematis, berdisiplin untuk mengevaluasi, meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi variabel dependen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti, sistem pengendalian internal untuk meminimalkan risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan kepercayaan publik, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang membantu pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengurangi tekanan eksternal dan

meningkatkan reputasi dan kompetensi sumber daya manusia bahwa organisasi memilih kebijakan akuntansi yang mendukung penyusunan laporan keuangan berkualitas untuk mengurangi biaya informasi dan konflik kepentingan antara pemerintah dan publik.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

2.1.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta, berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau *fraud* (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2018).

Sistem pengendalian internal dianggap sebagai respons terhadap motivasi kontraktual yang mendorong manajemen menyajikan laporan keuangan tertentu demi kepentingan pribadi atau politik. Dengan adanya sistem pengendalian yang kuat, distorsi dalam pelaporan keuangan akibat motif manajerial dapat diminimalisir (Watts & Zimmerman (1986). Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan bagian dari infrastruktur akuntansi yang memastikan informasi keuangan disajikan dengan benar dan sesuai standar yang mendukung asumsi

Positive Accounting Theory (PAT), bahwa organisasi bertindak untuk meminimalkan risiko melalui kebijakan dan prosedur internal (Arens dkk., 2020).

Dalam perspektif Agency Theory, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai alat pengawasan (monitoring mechanism) untuk mengurangi perilaku oportunistik agen (pemerintah) yang mungkin menyalahgunakan kewenangan dalam mengelola sumber daya publik. Mekanisme pengendalian ini membantu meminimalkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal (masyarakat), serta memastikan keandalan laporan keuangan (Jensen & Meckling, 1976).

2.1.4.2 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah, Indikator sistem pengendalian internal (SPI) merujuk pada tanda-tanda atau elemen-elemen yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi. Unsur-unsur SPI yang umum diukur meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing unsur:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. Untuk menciptakan

kondisi yang kondusif, hal-hal yang diperlukan adalah menciptakan suasana dan kesadaran tentang pentingnya pengendalian dalam suatu organisasi.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan-kemungkinan kejadian yang akan terjadi yang dapat mengancam terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Perangkat Daerah menetapkan tujuan Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkat kegiatan. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin timbul dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Mencakup berbagai tindakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggara tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Mencakup sistem informasi yang andal dan proses komunikasi yang efektif untuk mendukung pengendalian.

5. Pemantauan Pengendalian

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian secara berkelanjutan.

Penerapan kelima unsur ini secara terintegrasi diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Organisasi pemerintah daerah mengadopsi sistem pengendalian internal yang lebih baik untuk mendapatkan opini positif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan sistem pengendalian internal yang efektif penelitian mencerminkan prinsip *Positive Accounting Theory* (PAT), bahwa organisasi bertindak untuk mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan pemerintah.

2.1.4.3 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan Sistem Pengendalian Internal Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Mulyadi (2010), tentang tujuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah :

1. Menjaga kekayaan organisasi, Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan

tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

3. Mendorong efisiensi

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.

Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar hal ini dapat memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila struktur pengendalian

internal suatu perusahaan lemah maka akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

¹¹ 2.1.5 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

²⁹ 2.1.5.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1), tentang Sistem ¹ Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (Menteri Dalam Negeri, 2002).

⁷ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa ⁴ Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer (Menteri Dalam Negeri, 2006).

⁴ Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah sistem yang terdiri atas serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sistem

akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan, metode dan alat yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, menganalisis dan melaporkan informasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak internal dan eksternal pemerintahan daerah untuk mengambil keputusan ekonomi (Nordiawan, 2006).

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sarana yang memungkinkan agen untuk menyusun laporan keuangan sesuai kepentingannya, misalnya untuk mendapatkan insentif atau menjaga citra politik. PAT memandang bahwa penyusunan laporan tidak bebas nilai, namun dipengaruhi oleh kontrak dan kepentingan manajerial. Oleh karena itu, perlunya regulasi dan pengendalian agar sistem akuntansi benar-benar mencerminkan informasi yang objektif dan tidak bias (Watts & Zimmerman, 1986).

Dalam kerangka *Agency Theory*, sistem akuntansi keuangan daerah merupakan alat yang digunakan oleh agen (pemerintah daerah) untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada prinsipal (masyarakat). Sistem ini berfungsi mengurangi asimetri informasi melalui penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan sistem akuntansi yang baik, informasi keuangan menjadi lebih andal dan mencegah penyalahgunaan wewenang (Jensen & Meckling, 1976).

2.1.5.2 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) mencakup kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), prosedur pencatatan yang jelas dan sesuai standar, serta penyusunan laporan keuangan secara periodik. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, menetapkan tiga indikator untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), yaitu:

1. Kesesuaian terhadap Sistem Akuntansi keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem akuntansi keuangan daerah harus mengacu pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku pada saat ini yaitu bebrbasis akrual. Basis akrual yaitu mengakui transaksi keuangan pada saat terjadinya yaitu ketika sudah menjadi hak atau kewajibannya meskipun belum diterima atau dikeluarkan kasnya.
2. Proses pencatatan akuntansi disatukan kerja sesuai dengan prosedur pencatatan standar akuntansi keuangan daerah, Sistem akuntansi keuangan daerah harus dilakukan berdasarkan pencatatan yang berlaku umum yaitu dimana setiap transaksi keuangan yang terjadi dilakukan analisis transaksi di sertai bukti transaksi serta pencatatan transaksi harus di lakukan secara kronologis. Adapun komponen laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
3. Pembuatan laporan keuangan yang dilaporkan secara periodik, Sistem akuntansi keuangan daerah menyusun laporan keuangan daerah untuk

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan. Laporan keuangan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik guna kepentingan pengambilan keputusan.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) seperti standar berbasis akrual adalah respon pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan seperti Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sistem akuntansi keuangan daerah membantu pemerintah daerah memperoleh opini audit yang lebih baik, seperti opini Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP), yang meningkatkan kepercayaan publik, mencerminkan prinsip *Positive Accounting Theory* (PAT), bahwa organisasi bertindak untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi melalui kebijakan akuntansi yang sesuai dengan regulasi.

2.1.5.3 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Tujuan utama Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Informasi ini digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Berikut adalah beberapa tujuan rinci dari SKAD:

1. Penyediaan Informasi Keuangan: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan andal untuk

berbagai pihak, baik internal (manajemen pemerintah daerah) maupun eksternal (masyarakat, DPRD, auditor).

2. Pertanggungjawaban (Akuntabilitas): Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pihak-pihak terkait.
4. Pengawasan: Sistem ini memfasilitasi pengawasan yang efektif terhadap penggunaan anggaran daerah, membantu mencegah penyalahgunaan dan pemborosan.
5. Pengambilan Keputusan: Informasi yang dihasilkan oleh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan, penganggaran, dan kebijakan keuangan daerah.
6. Efisiensi dan Efektivitas: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
7. Transparansi: Dengan adanya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), proses pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, sehingga masyarakat dapat memantau dan menilai bagaimana anggaran daerah dikelola.
8. Kepatuhan: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

9. Peningkatan Kinerja: ³¹ Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk mengukur dan menilai kinerja keuangan daerah, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan.

Dengan demikian, ¹⁸ Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) bukan hanya sekadar ⁶ sistem pencatatan keuangan, tetapi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan ⁵ tata kelola pemerintahan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel.

2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.6.1 ⁶ Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah dimensi perilaku yang berada dibelakang kinerja kompeten (Baron & Armstrong, 2007). Kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghemat ⁴ waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu (Mardiasmo, 2018).

Dalam Sudarmanto (2009), kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki seseorang yang menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia bisa menjalankan penampilan kognisi, efeksi, dan perilaku psikomotorik tertentu, dari berbagai pandangan dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan menjalankan tugas atau pekerjaan dengan dilandasi oleh

pengetahuan, keterampilan dan didukung oleh sikap yang menjadi karakteristik individu.

⁴ Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dipandang sebagai variabel penting yang dapat memengaruhi keputusan manajerial dalam menyusun laporan keuangan. ⁶ Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak kompeten atau tidak memiliki integritas tinggi lebih mudah terpengaruh oleh motivasi pribadi atau politik, yang dapat mengarah pada penyimpangan informasi ²² akuntansi. Oleh karena itu, penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi strategi untuk menjaga kualitas informasi yang dilaporkan (Watts & Zimmerman, 1986).

Dalam kerangka *Agency Theory*, kompetensi SDM menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa agen (pemerintah) dapat menjalankan tugas pengelolaan dan pelaporan keuangan dengan akurat, transparan, dan bertanggung jawab kepada prinsipal (masyarakat). Agen yang kompeten akan cenderung lebih patuh terhadap regulasi dan mengurangi risiko informasi asimetris maupun tindakan oportunistik (Jensen & Meckling, 1976).

2.1.6.2 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam Binawati & Nindyaningsih (2022), terdapat empat indikator ⁴ kompetensi sumber daya manusia, yaitu:

1. Pengetahuan (*Knowledge*) Profesional Yang Diperlukan

Pengetahuan adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu atau pegawai untuk menjalankan pekerjaannya. Pengetahuan yang dimiliki akan digunakan dalam kegiatan pekerjaan. Dengan pengetahuan yang dimiliki pegawai secara tidak langsung menentukan kinerja perusahaan, jika pegawai

memiliki pengetahuan yang baik akan meningkatkan ke efisiensi perusahaan.

2. Keterampilan Profesional (*Skill*)

Keterampilan Individu merupakan kemampuan yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam perusahaan, bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaan bahkan mengimprovisasi apa yang mampu mempercepat dan memaksimalkan pekerjaannya.

3. Nilai dan Etika (*Attitude*)

Sikap merupakan pola tingkah pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan aturan-aturan yang perusahaan terapkan. Apa bila pegawai mampu sportif atas sikapnya terhadap perusahaan itu akan mendukung perusahaan dalam pencapaiannya.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan profesional, efektif dan efisien serta, meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan yang membantu organisasi mendapatkan opini positif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.1.6.3 Macam-macam Kompetensi Sumber Daya Manusia

Macam-macam Kompetensi Sumber Daya Manusia Michael Zwell sebagaimana dikutip oleh Wibowo (2013), memberikan lima macam kompetensi, yang terdiri dari:

1. *Task achievement*

Kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan Task achievement ditunjukkan oleh: orientasi pada hasil, mengelola kinerja, mempengaruhi inisiatif, efisiensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian teknis.

2. *Relationship*

Kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Kompetensi yang berhubungan dengan Relationship meliputi kerjasama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antar pribadi, kecerdasan organisasional, membangun hubungan, penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi dan sensitivitas lintas budaya.

3. *Personal attribute*

Kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berfikir, merasa, belajar, dan berkembang. Personal attribute merupakan kompetensi yang meliputi: integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, manajemen stress, berpikir analitis, dan berpikir konseptual.

4. *Managerial*

Kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan dan mengembangkan orang. Kompetensi manajerial berupa: memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain.

5. *Leadership*

Kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Kompetensi berkenaan dengan leadership meliputi: kepemimpinan visioner, berpikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen perubahan, membangun komitmen organisasional, membangun focus dan maksud, dasar-dasar, dan nilai-nilai.

2.1.6.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Michael Zwell sebagaimana yang dikutip oleh Wibowo (2013), mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu sebagai berikut:

1. Keyakinan dan nilai-nilai

Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat memengaruhi perilaku. Apabila mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berfikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu.

2. Keterampilan.

Keterampilan merupakan peran penting di kebanyakan kompetensi. Pengembangan keterampilan yang secara spesifik berkaitan dengan kompetensi dapat berdampak baik pada budaya organisasi dan kompetensi individual.

3. **Pengalaman**

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman berorganisasi, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya.

4. **Karakteristik Kepribadian.**

Kepribadian dapat mempengaruhi keahlian seorang karyawan dalam sejumlah kompetensi, termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim, memberikan pengaruh dalam membangun hubungan dalam tim.

5. **Motivasi**

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat berpengaruh positif terhadap motivasi bawahan.

6. **Isu Emosional**

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif.

7. **Kemampuan Intelektual**

Kompetensi bergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Faktor pengalaman dapat meningkatkan kecakapan dalam kompetensi.

Jadi secara umum, kompetensi sumber daya manusia adalah tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang guna melakukan suatu

kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi kemampuan dan pengetahuannya, maka semakin tinggi juga kualitas kompetensi sumber daya manusianya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu adalah studi atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan (Sugiyono, 2018). Peneliti mencantumkan berbagai hasil yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Ringkasan penelitian terdahulu disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu

No.	Nama Pengarang/Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Hasil Penelitian
1.	Sri Rahayu & Alfaniha Dewi Kanita (2023)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan keuangan	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem pengendalian Internal pada OPD berpengaruh

	Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022) Jurnal Ekombis Review-Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 11 No. 1 E-ISSN: 2716-0246 DOI: https://doi.org/10.376/ekombis.v11n1.2022.01.01	positif signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di OPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Secara parsial variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan Daerah Pada OPD Provinsi DKI Jakarta, Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada OPD Provinsi DKI Jakarta, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada OPD Provinsi DKI Jakarta.
--	---	--

2.	Enita Binawati & Cyrenia Tri Nindyaningsih (2022)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 19 No.1 ISSN: 2085-3688	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penentuan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Penatagunaan Keuangan Daerah yang dibuktikan dari hasil uji simultan (Uji F). Secara parsial menunjukkan hasil Sistem Akuntansi Daerah, Kompetensi menentukan Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Akuntansi Keuangan Daerah yang dibuktikan dari hasil uji parsial (Uji t).
----	---	---	---

3.	Ira Gustina (2021)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 10, No. 1 E-ISSN: 2598-7372	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
4.	Kartika Dwi Indrayani & Harjanti Widiastuti (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia

		Kabupaten Klaten) Jurnal Review Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 4 No. 1 E-ISSN: 2614-957 DOI: https://doi.org/10.1196/rab.040148	berpengaruh positif dalam memoderasi Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5.	Siti Miska & Nuramal (2022)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan YUME: Journal of Management, Vol. 5 No. 2 E-ISSN: 2614-8034 DOI: https://doi.org/10.37531/yume.vxix.3456	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Komeptensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

6.	Defiana & Halmawati (2023)	¹ Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada OPD Kabupaten Simalungun JNKA-Jurnal Nuansa Karya Akuntansi, Vol. 1 No. 2, Agustus 2023, Hal. 203-215 E-ISSN: 2988-2702 DOI: https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.16	² Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel, yaitu kompetensi SDM, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Uji simultan menunjukkan pengaruh yang signifikan secara bersama-sama, dengan koefisien determinasi R^2 sebesar 0,587. Ini berarti 58,7% variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut.
7.	Dinda Putri & Nunung A. R. (2023)	¹ Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bandung	Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem pengendalian internal maupun kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.

		Barat JBB- Journal of Business and Banking, Vol. 13 No. 1, Mei-Oktober 2023, Hal. 157-175 ISSN: 2088-7841 DOI: https://doi.org/10.14414/jbb.v13i1.3738	Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,718 menunjukkan bahwa kontribusi dua variabel ini sangat tinggi dalam menjelaskan variabilitas laporan keuangan.
8.	Made Ariada & Nyoman Ari S. D. (2023)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada OPD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021) Jurnal Akuntansi Profesi, Vol. 14 No. 2 E-ISSN: 2686-2468 DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jippg.v3i2	Penelitian ini membuktikan bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikansi masing-masing $< 0,05$. Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,342 menunjukkan kontribusi moderat dari ketiga variabel terhadap kualitas laporan.

9.	Mega Suryani Hutabri (2023)	1 Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah AFRE-Accounting and Financial Review, Vol. 6 No.3, Hal. 330- 336 ISSN: 2598-7763 E-ISSN: 2598-7771 DOI: https://doi.org/10.26905/afr.v6i3.8401	16 Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan. $R^2 = 0,609$
10.	Nur Isnaini Machmudiyanti & Muhammad Aufa (2023)	2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gresik RIMBA: Riset Ilmu Manajemen Bisnis	22 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan (10%) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,

		dan Akuntansi, Vol. 1 No. 4, Hal. 310-330 E-ISSN: 2988-6880 DOI: https://doi.org/10.61132/rimba.v1i4.312	sedangkan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. $R^2 = 0,483$
11.	Mega Astuti, Retno Wulandari & Supami Wahyu Setyowati (2024)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Jurnal Akuntansi Neraca, Vol. 1 No. 4 E-ISSN: 2987-1352	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah & Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan.
12.	Annisa Fitriani & Mahmudi (2025)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal serta Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Sistem

		Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bulungan Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, Vol. 7 Hal. 37-49	Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
13.	I Gusti Ayu Krisna Dewi & Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2020)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bali Jurnal Akuntansi Profesi, Vol. 11 No. 1, Juni 2020 E-ISSN: 2686-2468	Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

			pemerintah daerah.
14.	Ilda Putri Insirohmawati (2024)	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di BPPKAD Kabupaten Ponorogo JAPP: Jurnal Akuntansi, Vol. 4 No. 1 E-ISSN: 2808-098	Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ponorogo
15.	Astrit Dwi Fitriani, Aris Eddy S & Fadjar Harimurti (2025)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap

		YUME: Journal of Management, Vol. 8 No. 2, Hal. 263-275 E-ISSN: 2614-851	²⁷ kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan.
--	--	---	--

Sumber: Hasil Kajian Penulis, 2025.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep atau teori yang mendasari serta menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian. Kerangka pemikiran digunakan untuk menggambarkan suatu penelitian yang dilakukan, uraian tentang hubungan antara variabel yang terkait dengan masalah yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah. Kerangka ini membantu peneliti untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa hubungan antar variabel terjadi serta merancang metode penelitian yang tepat untuk menguji hubungan tersebut (Sugiyono, 2018).

Laporan keuangan pemerintah daerah sering kali mendapat perhatian karena ketidaksesuaian ⁵ dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan opini audit yang rendah. ¹ Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi indikator penting untuk menilai kualitas laporan keuangan memberikan kerangka pemikiran variabel independen berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah diukur melalui relevansi, keandalan, perbandingan dan pemahaman.

Berangkat dari opini WTP berturut-turut yang diraih Pemerintah kab. Indragiri Hilir, namun dengan asumsi bahwa tidak semua komponen pelaporan

keuangan dikuasai oleh sumber daya manusia secara merata. Mengacu pada ¹¹ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sebagai landasan ¹² pelaporan akuntansi ¹³ pemerintah daerah. Teori yang digunakan secara implisit adalah *Agency Theory*, di mana pemerintah sebagai agen harus bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai prinsipal melalui laporan keuangan yang berkualitas.

Peran ¹⁷ sistem pengendalian internal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, menekankan pentingnya lingkungan ¹⁸ pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan pemantauan. Lemahnya ¹⁹ pengendalian internal sering menjadi penyebab ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku memberikan kerangka pemikiran sistem ²⁰ pengendalian internal yang efektif akan meningkatkan ²¹ keandalan dan relevansi ²² laporan keuangan pemerintah dimana proses ²³ pengendalian internal yang baik membantu mencegah kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Penerapan ²⁹ Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) banyak daerah, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi kesulitan dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual, seperti yang ³⁰ diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kesulitan ini mencakup kurangnya infrastruktur, pelatihan dan pemahaman teknis memberikan kerangka pemikiran ³¹ penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk meningkatkan ³² kualitas laporan keuangan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan.

Dalam penelitian Rahayu & Kanita (2023), kerangka pemikiran ini menyatakan bahwa ⁴ kualitas laporan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu ¹ penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Penerapan SAKD memungkinkan proses pelaporan yang sistematis dan sesuai standar, sedangkan sistem pengendalian intern berfungsi sebagai pengawasan untuk menjamin keakuratan dan kepatuhan terhadap regulasi (Rahayu & Kanita, 2023).

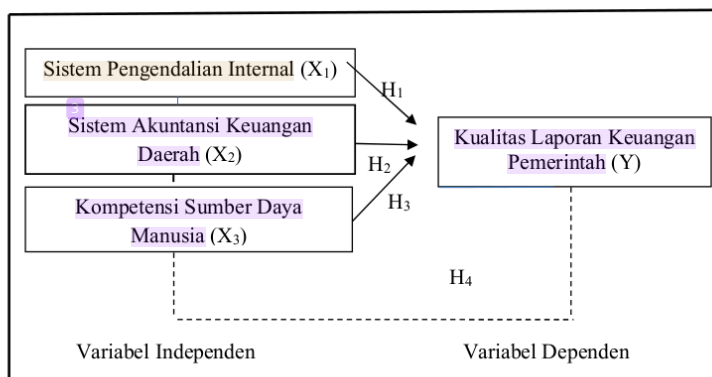
Dalam penelitian Gustina (2021), menjelaskan kerangka pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) dianggap mampu meningkatkan keandalan dan kepatuhan dalam proses pelaporan, sementara penerapan SAKD yang baik menjamin laporan keuangan disusun secara sistematis ⁶ sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan yang berkualitas diukur dari relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami, sehingga penerapan kedua sistem tersebut diyakini dapat meningkatkan ⁶ akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah (Gustina, 2021).

Dalam penelitian Mispa & Nuramal (2022), penelitian ini membangun kerangka pemikiran ²⁷ bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi ⁵ dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia. SPI berperan dalam mendeteksi dan mencegah kesalahan dalam pelaporan, SAKD menyusun proses pelaporan keuangan yang sesuai prinsip akuntansi, dan kompetensi SDM menjadi elemen penting karena pelaporan yang akuntabel bergantung pada kemampuan pegawai dalam mengelola data keuangan. Ketiga faktor tersebut secara teoritis diyakini

saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang informatif dan dapat dipercaya (Mispa & Nuramal, 2022).

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk memahami dan menerapkan standar akuntansi. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dibidang akuntansi dan keuangan menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan memberikan kerangka pemikiran kompetensi sumber daya manusia yang kompeten lebih mampu menyusun laporan keuangan yang relevan, andal dan sesuai standar.

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran penelitian, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan antara sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan pemerintah. Secara garis besar kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

Keterangan :

X₁ = Sistem Pengendalian Internal

X₂ = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X₃ = Kompetensi Sumber Daya Manusia

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

—————> = Secara Parsial

- - - - -> = Secara Simultan

Kerangka pemikiran menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan secara simultan juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menguji hubungan tersebut melalui pendekatan empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal, meningkatkan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan membangun kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) demi tercapainya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2019). Berdasarkan kerangka pemikiran, hipotesis yang diambil adalah sebagai berikut :

- H₁ = Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
- H₂ = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
- H₃ = Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
- H₄ = Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan fenomena sesuai dengan rumusan masalah dan mencari pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 2018). Jenis data merujuk pada klasifikasi atau kategori informasi yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian berdasarkan karakteristik. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, contohnya adalah jumlah, skor kuesioner yang diisi responden, nilai atau ukuran yang dapat diuji dengan teknik statistik seperti, rata-rata dan regresi atau korelasi.

Sumber data merupakan asal atau tempat data diperoleh untuk mendukung penelitian atau pengambilan keputusan yang dikelompokkan berdasarkan cara perolehan data dan tingkat keasliannya. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh (Sugiyono, 2018). Sumber data-data tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai suatu hal yang ingin diketahui, sumber data yang digunakan, yaitu, data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber orang lain dan bertujuan sebagai informasi mengenai latar belakang penelitian, penelitian terdahulu untuk mendukung teori penelitian mengenai variabel Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau responden dengan melalui kuesioner dan wawancara (Sugiyono, 2017). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh langsung dari responden penelitian melalui kuisisioner yang disebarkan kepada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir dengan contoh: penilaian responden terhadap pengendalian internal atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di tempat mereka bekerja.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian berkaitan dengan hal-hal yang dibahas yaitu “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir” adalah pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai objek penelitian, merupakan unit kerja pemerintah yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program daerah serta penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menjadi objek evaluasi dalam penelitian, sehingga relevan untuk penelitian terkait kualitas laporan keuangan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan yaitu pada April hingga selesai dan dibatasi sesuai dengan kondisi yang terjadi. Penyebaran kuesioner yang dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2018). Dalam konteks penelitian ini, populasi meliputi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang diambil menggunakan teknik tertentu untuk dijadikan sumber data penelitian (Sugiyono, 2018).

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel atas dasar pertimbangan (Indriantoro & Supomo, 2013). Adapun pertimbangan pemilihan sampel memiliki beberapa kriteria, sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria
1.	Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai/staf yang melaksanakan fungsi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dan para pegawai/staf pemegang kas/bendahara penerimaan maupun pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten

	Indragiri Hilir
2.	Responden dalam penelitian ini adalah kepala sub bagian keuangan dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir selaku pengambil keputusan dalam menggunakan anggaran dan menggunakan barang

Pada tabel 3.1 diatas pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dimana dengan menentukan kriteria yang memastikan relevansi data terhadap tujuan dari penelitian yang dilakukan. Responden yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada penelitian ini merupakan pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hilir yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah tabel daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir:

Tabel 3.2 : Daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
7.	Badan Pendapatan Daerah

8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.	Dinas Pendidikan
11.	Dinas Kesehatan
12.	Dinas Sosial
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Dinas Pertanian
21.	Dinas Perkebunan
22.	Dinas Perikanan
23.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
25.	Dinas Lingkungan Hidup
26.	Dinas Perhubungan
27.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
28.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
29.	Dinas Kebudayaan

30.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
31.	Satuan Polisi Pamong Praja
32.	Rumah Sakit Umum Daerah
33.	Kecamatan
34.	Kelurahan

Sumber: <https://data.inhilkab.go.id>.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Kualitas laporan keuangan adalah kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pengguna dan pembaca laporan keuangan (Harahap, 2013). Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, tentang laporan keuangan bahwa kualitas laporan keuangan diukur berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tercermin dalam pemenuhan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (Kementerian Keuangan, 2010).

Dalam penelitian Rahayu & Kanita (2022), terdapat empat indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu :

1. Laporan Keuangan Yang Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu dengan menggunakan skala *likert*. Skala *likert* adalah salah satu

jenis skala pengukuran untuk mengukur sikap, opini atau persepsi responden terhadap suatu pernyataan. Skala *likert* ini skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban yang terdiri dari sebagai berikut:

NILAI	KODE	KETERANGAN
5	ST	Sangat Setuju
4	S	Setuju
3	KS	Kurang Setuju
2	TS	Tidak Setuju
1	STS	Sangat Tidak Setuju

Sumber: (Sugiyono, 2018).

3.4.2 Sistem Pengendalian Internal (Xi)

Sistem Pengendalian Internal adalah struktur organisasi, metode dan ukuran yang terkoordinasi dalam perusahaan untuk melindungi kekayaan organisasi, menjamin keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, serta mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016). Dalam penelitian Gustina (2021), Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, tentang sistem pengendalian internal terdiri dari lima indikator, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian internal

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel ⁶ sistem pengendalian internal yaitu dengan menggunakan skala *likert* untuk mengukur sikap, opini atau persepsi responden terhadap suatu pernyataan. Skala *likert* ini skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban yang terdiri dari sebagai berikut:

NILAI	KODE	KETERANGAN
5	ST	⁵ Sangat Setuju
4	S	Setuju
3	KS	Kurang Setuju
2	TS	Tidak Setuju
1	STS	Sangat Tidak Setuju

Sumber: (Sugiyono, 2018).

⁶ 3.4.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂)

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem yang dirancang untuk ¹ menghasilkan laporan keuangan daerah yang transparan akuntabel dan sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual mencakup pencatatan pendapatan, belanja, asset, kewajiban dan ekuitas dana daerah (Mahmudi, 2021). Dalam penelitian Rahayu & Kanita (2022), ³³ Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, menetapkan tiga indikator untuk standar ⁵ akuntansi keuangan daerah, yaitu:

1. Kesesuaian terhadap sistem akuntansi keuangan daerah dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

2. Proses pencatatan akuntansi disatukan kerja sesuai dengan prosedur pencatatan standar akuntansi keuangan daerah

3. Pembuatan laporan keuangan yang dilaporkan secara periodik

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel sistem akuntansi keuangan daerah yaitu skala *likert* untuk mengukur sikap, opini terhadap suatu pernyataan.

Skala *likert* ini berisi 5 tingkat preferensi jawaban, sebagai berikut:

NILAI	KODE	KETERANGAN
5	ST	Sangat Setuju
4	S	Setuju
3	KS	Kurang Setuju
2	TS	Tidak Setuju
1	STS	Sangat Tidak Setuju

Sumber: (Sugiyono, 2018).

3.4.4 Kompetensi Sumber Daya manusia (X₃)

Kompetensi sumber daya manusia adalah faktor utama yang memengaruhi kinerja individu dan organisasi yang mencakup aspek kemampuan intelektual, keterampilan teknis dan sikap kerja (Mangkunegara, 2017). Dalam penelitian Binawati & Nindyaningsih (2022), terdapat empat indikator kompetensi sumber daya manusia, yaitu:

1. Pengetahuan Profesional Yang Diperlukan (*Knowledge*)
2. Keterampilan Profesional atau keahlian (*Skill*)
3. Nilai dan Etika (*Attitude*)

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel **kompetensi sumber daya manusia** yaitu dengan menggunakan **skala likert**. Skala *likert* adalah salah satu jenis skala pengukuran untuk mengukur sikap, opini atau persepsi responden terhadap suatu pernyataan. Skala *likert* ini skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban yang terdiri dari sebagai berikut:

NILAI	KODE	KETERANGAN
5	ST	Sangat Setuju
4	S	Setuju
3	KS	Kurang Setuju
2	TS	Tidak Setuju
1	STS	Sangat Tidak Setuju

Sumber: (Sugiyono, 2018).

3.5 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari sumber tertentu (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Metode pengumpulan data pada penelitian:

3.5.1 Metode Angket atau Kuesioner

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode ini cocok digunakan jika jumlah responden banyak dan peneliti ingin

mengumpulkan data secara efisien (Sugiyono, 2018). Tujuan penyebaran angket atau kuesioner adalah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Kuesioner ditujukan kepada pegawai atau staf dan pihak yang berkaitan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir.

3.5.2 Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku, literatur, catatan dan laporan yang relevan dengan masalah penelitian. Studi pustaka berfungsi untuk memperoleh dasar teoritis dan data sekunder untuk mendukung penelitian (Sugiyono, 2018). Selain itu, studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah yang dilakukan dengan mempelajari buku dan jurnal.

3.6 Analisia Data

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan, mengolah dan menyajikan data sehingga menghasilkan informasi yang dapat diinterpretasikan untuk menjawab tujuan penelitian (Sugiyono, 2018). Teknik analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami dan dapat digunakan untuk mendukung keputusan penelitian serta untuk mengolah data menjadi hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode analisis sebagai berikut :

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan informasi tentang data yang telah dikumpulkan tanpa membuat generalisasi. Hasil analisis berupa visualisasi data atau ukuran-ukuran statistik seperti *mean* (nilai rata-rata), *median* (nilai tengah) dan distribusi frekuensi (Sugiyono, 2018). Statistik deskriptif digunakan untuk mendukung tahap analisis statistik yang lebih kompleks. Contoh statistik deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik dan besaran-besaran lain dengan kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data merupakan uji yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan melalui instrument penelitian valid (tepat sasaran) dan reliabel (konsisten). Validitas mengukur kemampuan instrument dalam menggambarkan apa yang ingin diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil pengukuran jika diuji ulang (Sugiyono, 2018). Uji kualitas data mencakup validitas (menilai akurasi alat ukur terhadap konsep yang diukur) dan reliabilitas (menilai konsistensi hasil pengukuran). Kedua uji ini penting untuk memastikan ⁵ data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan digunakan dalam penelitian. Uji kualitas data yang digunakan, yaitu:

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur validnya suatu data. Valid berarti instrumen yang tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2018). Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidak valid suatu kuesioner, untuk mengetahui apakah suatu item dikatakan valid tidak maka dilakukan perbandingan antara koefisien r^{hitung} dengan koefisien r^{tabel} . Untuk mengukur tingkat validitas suatu kuesioner adalah menggunakan $\alpha = 0,05$ (5%) dengan diketahui jika $r^{\text{hitung}} > r^{\text{tabel}}$ kuesioner adalah tidak valid/gugur dan sebaliknya jika $r^{\text{hitung}} < r^{\text{tabel}}$ kuesioner adalah valid/diterima.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2018) Reliabilitas adalah jika hasil penelitian terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Reliabilitas adalah instrumen yang bisa digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji apakah hasil penelitian (kuesioner) dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan uji statistik, variabel yang reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ dan tidak reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $< 0,60$.

3.6.3 Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik merupakan metode untuk menguji apakah model regresi linier bebas dari pelanggaran asumsi dasar, sehingga hubungan antara variabel independen dan dependen dapat diinterpretasikan dengan baik. Uji asumsi klasik penting untuk memastikan model regresi menghasilkan estimasi yang akurat dan

dapat diandalkan dalam penelitian kuantitatif. Asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedasitas dan uji autokorelasi (Ghozali, 2018).

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal data mendekati normal. Variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2018). Dalam pengujian normalitas ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria dalam model regresi adalah jika signifikansi dibawah 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal, tetapi jika signifikan diatas 0.05 berarti data berdistribusi normal.

3.6.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas digunakan Tolerance Value atau Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF dibawah 10 dan Tolerance Value diatas 0,10 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas dan jika nilai VIF diatas 10 dan Tolerance Value dibawah 0,10 maka terdapat gejala multikolinieritas.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Glejser. Uji Glejser bekerja dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi dari regresi ini lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

3.6.4 Uji Hipotesa

3.6.4.1 Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan uji yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji regresi linier berganda mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan dengan tujuan memprediksi dan menganalisis hubungan antara variabel. Persamaan regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

X_1 = Sistem Pengendalian Internal

X_2 = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X_3 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

a = Konstanta

$b_1b_2b_3$ = Koefisien Regresi untuk masing-masing variabel independen

e = Error term

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

3.6.4.2 Uji Parsial (Uji-t)

Menurut Ghozali (2018), Uji statistik uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan dan penolakan hipotesa dilakukan dengan kriteria. Jika nilai $t^{\text{hitung}} > t^{\text{tabel}}$, maka hipotesa diterima. ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai $t^{\text{hitung}} < t^{\text{tabel}}$, maka hipotesa ditolak. Hal ini berarti secara parsial independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.4.3 Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji signifikan (Uji-F) merupakan uji yang digunakan untuk mengukur apakah sebuah variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam

model mempunyai pengaruh secara serentak atau bersama terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2018).⁸ Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika *probability value* < 0,05 maka H_3 diterima dan jika *probability value* > 0,05 maka H_3 ditolak. Kriteria pengujian H_4 diterima artinya data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan H_4 ditolak artinya data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen bila $F_{hitung} < F_{tabel}$.

3.6.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)⁹

Koefisien determinasi merupakan uji yang menggambarkan presentase variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi, yang mengindikasikan seberapa baik model tersebut menjelaskan data (Ghozali, 2018). Uji koefisien determinasi (R^2)¹ digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variabilitas dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik dalam menjelaskan variasi data.² Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Pembentukan OPD Kabupaten Indragiri Hilir

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan bagian penting dari struktur pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan, sesuai kewenangan yang dimiliki daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian dari Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, yang kemudian menjadi bagian dari Provinsi Riau.

Pada masa awal, struktur kelembagaan pemerintahan daerah masih sederhana dan belum dikenal dengan istilah “OPD” seperti sekarang. Fungsi pemerintahan dijalankan oleh instansi pemerintahan tingkat kabupaten dalam bentuk Dinas, Badan, dan Sekretariat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diperkuat dengan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diberi kewenangan lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pembentukan perangkat daerah.

Pada periode ini, Kabupaten Indragiri Hilir mulai menyusun kelembagaan OPD yang mengacu pada peraturan nasional dan kebutuhan daerah, dengan

banyak dinas teknis yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penyesuaian struktur OPD terbaru dilakukan berdasarkan: ³ [Peraturan Pemerintah \(PP\) Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah](#) dan ²⁶ [Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah](#).

Melalui regulasi ini, struktur OPD mengalami penyederhanaan, penggabungan, serta pengklasifikasian berdasarkan tipologi urusan dan beban kerja. OPD terbagi menjadi: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas-dinas teknis (urusan wajib dan pilihan), Badan-badan daerah, Inspektorat, Kecamatan. Jumlah dan struktur OPD disesuaikan kembali berdasarkan evaluasi kebutuhan daerah dan kebijakan pemerintah pusat. Hingga saat ini, terjadi beberapa kali restrukturisasi, seperti pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran atau pemisahan Diskominfo dari Dinas Perhubungan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang menjalankan fungsi administrasi, pelayanan publik, dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan ³ [Peraturan Pemerintah \(PP\) Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah](#). Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki berbagai OPD yang mencakup dinas-dinas, badan, dan sekretariat daerah yang berperan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam konteks penelitian ini, OPD dijadikan sebagai unit analisis untuk mengkaji pengaruh sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pemilihan OPD Kabupaten Indragiri Hilir sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai bagian dari institusi pemerintah daerah, OPD memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, serta penerapan prinsip-prinsip good governance. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh variabel independen terhadap dependen dalam ruang lingkup OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan data dari laman PPID Indragiri Hilir, saat ini pada tahun 2025 jumlah dari OPD yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 46 Unit OPD yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 36 Dinas/Instansi. Peneliti kemudian menggunakan 34 OPD yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir untuk diteliti dan menyebarkan 2 buah kuesioner untuk masing masing OPD sehingga total kuesioner yang disebarkan adalah sebanyak 68 kuesioner. Dari 68 kuesioner yang dibagikan tersebut terdapat 55 kuesioner yang dikembalikan dan 13 kuesioner yang tidak kembali. Berikut adalah tabel penyebaran kuesioner pada OPD di Kabupaten Indragiri Hilir:

Tabel 4.1: Distribusi Penyebaran Kuesioner

No.	Keterangan	Kuesioner	
		Disebarkan	Kembali
1	Sekretariat Daerah	2	2
2	Sekretariat DPRD	2	0
3	Inspektorat Daerah	2	2
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2

5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2	2
7	Badan Pendapatan Daerah	2	2
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	2
10	Dinas Pendidikan	2	2
11	Dinas Kesehatan	2	2
12	Dinas Sosial	2	2
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	2
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	2
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	0
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	2
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	2
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	2
20	Dinas Pertanian	2	2
21	Dinas Perkebunan	2	2
22	Dinas Perikanan	2	2

23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	2
24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	2
25	Dinas Lingkungan Hidup	2	2
26	Dinas Perhubungan	2	1
27	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2	0
28	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2	0
29	Dinas Kebudayaan	2	2
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	2
31	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2
32	Rumah Sakit Umum Daerah	2	2
33	Kecamatan	2	0
34	Kelurahan	2	0
TOTAL		68	55

Sumber: *Data Lapangan, 2025*.

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah disebarkan kuesioner, hanya 25 OPD di Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat diolah dalam penelitian ini karena terdapat 55 Kuesioner yang telah dikembalikan. Sedangkan, 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) datanya tidak dapat diolah karena sejumlah 13 kuesioner tidak dikembalikan yang terdiri dari tidak di isi dan tidak lengkap. Adapun distribusi kuesioner yang telah disebarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2: Distribusi Kuesioner

Item	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dibagikan	68	100%
Kuesioner yang tidak di isi	13	19,12%
Kuesioner yang tidak lengkap	0	0
Kuesioner yang dapat diolah	55	80,88%

Sumber: *Data Lapangan, 2025.*

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa penelitian telah menyebarkan sebanyak 68 kuesioner, dimana 13 kuesioner yang tidak di isi atau setara dengan 19,12% total persentase kuesioner yang tidak dikembalikan. Sedangkan, 55 kuesioner dapat diolah yang berarti tingkat pengembalian dari kuesioner yang telah dibagikan sebesar 80,88%.

4.1.2 Karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan penyebaran angket atau kuesioner secara langsung kepada responden di 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir dengan penyebaran kuesioner sebanyak 68 buah ke 34 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Hanya 55 kuesioner yang terkumpul dapat memenuhi syarat untuk diolah. Berdasarkan hasil tersebut peneliti menggunakan data dari 55 kuesioner yang dapat diolah secara lengkap sebagai mana tersaji pada tabel domografi responden berikut ini:

Tabel 4.3: Domografi Responden

Data	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	18	32,7%
Perempuan	37	67,3%
Usia		
20-30 Tahun	16	29,1%
31-40 Tahun	20	36,4%
41-50 Tahun	12	21,8%
> 50 Tahun	7	12,7%
Masa Jabatan		
< 1 Tahun	15	27%
1-5 Tahun	28	51%
> 5 Tahun	12	22%
Jenjang Pendidikan		
S-2	21	38%
S-1	30	54,8%
D-3	2	3,6%
SMA/SMK	2	3,6%

Sumber: *Data Olahan, 2025.*

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan sebanyak 37 orang atau sekitar 67,3%, selanjutnya usia responden yang paling banyak berada pada usia 31-40 Tahun

yaitu sebanyak 20 orang atau 36,4%. Mayoritas responden dalam penelitian ini telah bekerja selama 1-5 tahun sebanyak 28 orang atau setara dengan 51%, dimana pada masa ini OPD masih dikatakan masa produktif yang mengindikasikan tingginya nilai kinerja. Sedangkan, jenjang pendidikan terbanyak responden yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah jenjang pendidikan S.1 yaitu sebanyak 30 orang atau setara dengan 54,8%.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Uji Statistif Deskriptif

Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan informasi tentang data yang telah dikumpulkan tanpa membuat generalisasi. Hasil analisis berupa visualisasi data atau ukuran-ukuran statistik seperti mean (nilai rata-rata), median (nilai tengah) dan distribusi frekuensi (Sugiyono, 2018). Contoh statistik deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik dan besaran-besaran lain dengan kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada.

Hasil penelitian analisis tabel statistik deskriptif dapat dilihat dalam tabel dengan kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4: Hasil Uji Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Pengendalian Internal	55	39	50	43.42	3.740
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	55	63	80	69.69	5.969
Kompetensi Sumber Daya Manusia	55	22	30	25.89	2.424
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	55	33	40	37.16	2.299
Valid N (listwise)	55				

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2025.

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menjelaskan bahwa dari 55 kuesioner yang telah diisi oleh responden dapat diketahui bahwa Variabel X₁ yaitu Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai minimum 39, nilai maksimum 50, rata rata sebesar 43,42 dengan nilai standar deviation 3,740. Variabel X₂ yaitu sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai minimum 63, nilai maksimum 80, nilai rata-rata 69,69 dengan nilai standar deviation 5,969. Variabel X₃ yaitu kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai minimum 22, nilai maksimum 30, nilai rata-rata 25,89 dengan nilai standar deviation 2,424. Variabel Y yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah memiliki nilai minimum 33, nilai maksimum 40, nilai rata-rata 37,16 dengan nilai standar deviation 2,299.

4.2.2 Uji Kualitas Data

4.2.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur validnya suatu data. Valid berarti instrumen yang tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya

diukur (Sugiyono, 2018). Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara satu faktor dengan skor total. Pengukuran validitas item dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

a. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Tabel 4.5 : Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,611	0,2656	Valid
2	0,609	0,2656	Valid
3	0,645	0,2656	Valid
4	0,679	0,2656	Valid
5	0,592	0,2656	Valid
6	0,516	0,2656	Valid
7	0,475	0,2656	Valid
8	0,585	0,2656	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2025.

Berdasarkan tabel 4.5 di atas hasil Uji Validitas pada variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah yang menunjukkan nilai *pearson correlation* (r_{hitung}) untuk setiap pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel dengan menggunakan rumus $df = n-2$ untuk nilai $df = 55-2=53$, dengan nilai alpha (tingkat kesalahan) 0,05 atau 5% diperoleh nilai r tabel sebesar 0,2656. Hal ini menandakan bahwa dalam 8 item pertanyaan kuesioner yang disebarkan digunakan dalam mengukur masing-masing variabel kualitas laporan keuangan

dengan nilai $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ (0,2656) adalah valid dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya.

b. ¹ Sistem Pengendalian Internal (X_1)

Tabel 4.6: Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal

Item Pertanyaan	² $r \text{ Hitung}$	$r \text{ Tabel}$	Keterangan
1	0,816	0,2656	Valid
2	0,773	0,2656	Valid
3	0,873	0,2656	Valid
4	0,810	0,2656	Valid
5	0,592	0,2656	Valid
6	0,685	0,2656	Valid
7	0,681	0,2656	Valid
8	0,729	0,2656	Valid
9	0,839	0,2656	Valid
10	0,821	0,2656	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2025.

¹ Berdasarkan tabel 4.6 di atas hasil Uji Validitas pada variabel sistem pengendalian internal menunjukkan nilai *pearson correlation* ³ ($r \text{ hitung}$) untuk setiap pertanyaan lebih besar dari nilai $r \text{ tabel}$ dengan menggunakan rumus $df = n - 2$ untuk nilai $df = 55 - 2 = 53$ dengan nilai alpha (tingkat kesalahan) 5% diperoleh nilai $r \text{ tabel}$ sebesar 0,2656. Hal ini menandakan bahwa dalam 10 item pertanyaan kuesioner yang disebarkan digunakan dalam mengukur masing-masing variabel

sistem pengendalian internal dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,2656) adalah valid dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya.

c. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

¹⁰
Tabel 4.7: Hasil Uji Validitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,815	0,2656	Valid
2	0,796	0,2656	Valid
3	0,789	0,2656	Valid
4	0,798	0,2656	Valid
5	0,781	0,2656	Valid
6	0,806	0,2656	Valid
7	0,749	0,2656	Valid
8	0,792	0,2656	Valid
9	0,813	0,2656	Valid
10	0,730	0,2656	Valid
11	0,699	0,2656	Valid
12	0,581	0,2656	Valid
13	0,632	0,2656	Valid
14	0,721	0,2656	Valid
15	0,731	0,2656	Valid
16	0,697	0,2656	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2025.

Berdasarkan tabel 4.7 di atas hasil Uji Validitas pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan nilai *pearson correlation* (r hitung) untuk setiap pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel dengan menggunakan rumus $df = n-2$ untuk nilai $df = 55-2=53$ dengan nilai alpha (tingkat kesalahan) 5% diperoleh nilai r tabel sebesar 0,2656. Hal ini menandakan bahwa dalam 16 item pertanyaan kuesioner yang disebarkan digunakan dalam mengukur masing-masing variabel sistem akuntansi keuangan daerah dengan nilai r hitung > r tabel (0,2656) adalah valid dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya.

d. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Tabel 4.8: Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,878	0,2787	Valid
2	0,792	0,2787	Valid
3	0,829	0,2787	Valid
4	0,686	0,2787	Valid
5	0,813	0,2787	Valid
6	0,800	0,2787	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2025.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas hasil Uji Validitas pada variabel kompetensi sumber daya manusia menunjukkan nilai *pearson correlation* (r hitung) untuk setiap pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel dengan menggunakan rumus $df = n-2$ untuk nilai $df = 55-2=53$ dengan nilai alpha (tingkat kesalahan) 5% diperoleh nilai r tabel sebesar 0,2787. Hal ini menandakan bahwa dalam 6 item pertanyaan

kuesioner yang disebarkan digunakan dalam mengukur masing-masing variabel kompetensi sumber daya manusia dengan nilai r hitung $> r$ tabel (0,2656) adalah valid dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2018), Reliabilitas adalah jika hasil penelitian terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Reliabilitas adalah instrumen yang bisa digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji apakah hasil penelitian (kuesioner) dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan uji statistik, variabel yang reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ dan tidak reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $< 0,60$.

Tabel 4.9: Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Standard	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)	0,730	0,600	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X ₁)	0,919	0,600	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₂)	0,947	0,600	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₃)	0,880	0,600	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2025.

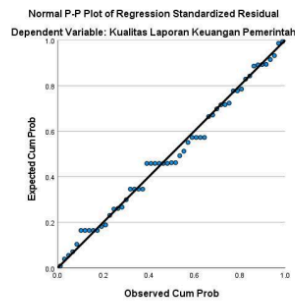
Pada tabel 4.9 menunjukkan nilai *Crobach's Alpha* terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah adalah sebesar (0,941), Sistem Pengendalian Internal adalah sebesar (0,912), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebesar (0,949) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah sebesar (0,887). Keempat variabel reliabel karena memiliki nilai $> 0,600$.

4.2.3 Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik penting untuk memastikan model regresi menghasilkan estimasi yang akurat dan dapat diandalkan dalam penelitian kuantitatif. Asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedasitas dan uji autokorelasi (Ghozali, 2018).

4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal data mendekati normal. Variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2018). Dalam pengujian normalitas ini digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria dalam model regresi adalah jika signifikansi dibawah 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal, tetapi jika signifikan diatas 0.05 berarti data berdistribusi normal. Berikut gambar grafik chart normal P-P Plot pada hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 2 dibawah sebagai berikut:



Gambar 2: Normal P-P Plot

Sumber: Olahan Data SPSS Versi 27, 2025.

Berdasarkan gambar 2 hasil uji normalitas dapat dilihat grafik chart Normal Probability Plot (P-P Plot) menunjukkan bahwa titik-titik mendekati garis diagonal dan tidak melenceng ke kanan dan kekiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data penelitian adalah normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat melalui tabel 4.10 dibawah ini:

Tabel 4.10: Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.67623183
Most Extreme Differences	Absolute		.080
	Positive		.080
	Negative		-.076
Test Statistic			.080
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.512
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.499
		Upper Bound	.525

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1314643744.

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2025.

Pada tabel 4.10 berdasarkan hasil uji normalitas *Kolmogorov smirnov* nilai signifikansi $0,200 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal, maka model penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik normalitas.

4.2.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas digunakan *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai $VIF < 10$ dan *Tolerance Value* $> 0,10$ maka tidak terdapat gejala multikolinieritas dan jika nilai $VIF > 10$ dan *Tolerance Value* $< 0,10$ maka terdapat gejala multikolinieritas.

Tabel 4.11: Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Sistem Pengendalian Internal	.306	3.273
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.251	3.977
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.512	1.955

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2025.

Pada tabel 4.11 hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* sistem pengendalian internal adalah 0,306. Nilai *Tolerance* sistem akuntansi keuangan daerah adalah 0,251 dan nilai *Tolerance* kompetensi sumber daya manusia adalah 0,512. Ketiga variabel memiliki nilai *Tolerance* $> 0,10$

maka tidak terdapat multikolonieritas dalam model persamaan regresi tidak terdapat multikolonieritas dalam penelitian ini.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Jika nilai signifikansi dari regresi ini > dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

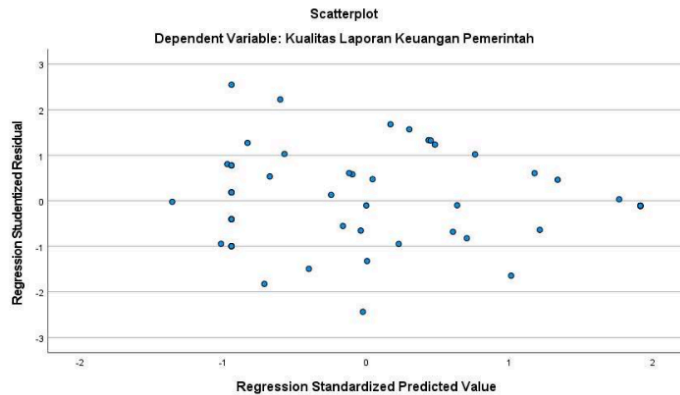
Tabel 4.12: Hasil Uji Heteroskedasitas dengan Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	17.703	2.967			5.967	.000		
Sistem Pengendalian Internal	.291	.114	.473		2.563	.013	.306	3.273
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	-.023	.078	-.060		-.294	.770	.251	3.977
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.326	.135	.343		2.407	.020	.512	1.955

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2025.

Pada tabel 4.12 hasil uji heteroskedasitas menunjukkan bahwa apabila nilai signifikan > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Dari output diatas,

maka tampak bahwa ketiga variabel tidak ada gejala heteroskedasitas, variabel sistem akuntansi keuangan daerah dengan nilai signifikan $0,013 > 0,05$. Sistem akuntansi keuangan daerah dengan nilai signifikan $0,770 > 0,05$ dan kompetensi sumber daya manusia dengan nilai signifikan $0,020 > 0,05$ maka, tidak terjadi gejala heteroskedasitas



Gambar 3: Grafik Uji Heteroskedasitas

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2025.

Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat *scatterplot* antara regresi standar residual (Sumbu Y) dan regresi standar prediksi value (sumbu X) dapat dilihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal tersebut menandakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedasitas dalam model regresi penelitian ini, sehingga data dapat dialnjutkan ke uji berikutnya.

4.2.4 Uji Hipotesa

4.2.4.1 Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan uji yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji regresi linier berganda mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan dengan tujuan memprediksi dan menganalisis hubungan antara variabel. Persamaan regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

X₁ = Sistem Pengendalian Internal

X₂ = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X₃ = Kompetensi Sumber Daya Manusia

a = Konstanta

b₁b₂b₃ = Koefisien Regresi untuk masing-masing variabel independen

e = Error term

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.13:

Tabel 4.13: Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	<i>Coefficients^a</i>		Beta	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	17.703	2.967		5.967	.000		
Sistem Pengendalian Internal	.291	.114	.473	2.563	.013	.306	3.273
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	-.023	.078	-.060	-.294	.770	.251	3.977
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.326	.135	.343	2.407	.020	.512	1.955

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2025.

Dari tabel 4.13 menunjukkan hasil terkait uji regresi linier berganda diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 17,703 + 0,291 X_1 - 0,023 X_2 + 0,326 X_3 + e$$

Dari persamaan diatas diketahui:

1. Nilai konstanta sebesar 17,703 menunjukkan arti bahwa apabila nilai Sistem Pengendalian Internal (X_1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3) bernilai 0, maka nilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) sebesar 17,703 satuan.
2. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X_1) mempunyai koefisien sebesar 0,291 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu persen Sistem Pengendalian Internal (X_1) menyebabkan kenaikan pada Kualitas laporan Keuangan Pemerintah (Y) sebesar 0,291 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

3. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) mempunyai koefisien sebesar -0,023 dan bertanda negatif. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu persen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) menyebabkan penurunan pada Kualitas laporan Keuangan Pemerintah (Y) sebesar -0,023 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
4. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3) mempunyai koefisien sebesar 0,326 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu persen Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3) menyebabkan kenaikan pada Kualitas laporan Keuangan Pemerintah (Y) sebesar 0,326 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

4.2.4.2 Uji Parsial (Uji-t)

Menurut Ghozali (2018) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan dan penolakan hipotesa dilakukan dengan kriteria. Jika nilai t hitung $>$ t tabel, maka hipotesa diterima. ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai t hitung $<$ t tabel, maka hipotesa ditolak. Hal ini berarti secara parsial independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji parsial (Uji-t) dapat dilihat pada tabel 4.14:

Tabel 4.14: Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	17.703	2.967			5.967	.000		
Sistem Pengendalian Internal	.291	.114	.473		2.563	.013	.306	3.273
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	-.023	.078	-.060		-.294	.770	.251	3.977
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.326	.135	.343		2.407	.020	.512	1.955

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2025.

Berdasarkan tabel 4.14 diatas menunjukkan hasil uji parsial (Uji-t) dapat dilihat dengan $n=55$ mempunyai t_{tabel} 2,00404 bahwa:

1. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X_1) memiliki t_{hitung} 2,563 sedangkan, t_{tabel} 2,00404. Sehingga, $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,563 > 2,00404$) dengan signifikansi untuk variabel Sistem Pengendalian Internal (X_1) adalah 0,013 yang artinya < dari taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) memiliki t_{hitung} -0,294 sedangkan, t_{tabel} 2,00404. Sehingga, $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,294 < 2,00404$) dengan signifikansi untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) adalah 0,770 yang artinya > dari taraf signifikan 0,05 maka H_0 diterima H_2 ditolak.

Dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3) memiliki t_{hitung} 2,407 sedangkan, t_{tabel} 2,00404. Sehingga, $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,407 > 2,00404$) dengan signifikansi untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3) adalah 0,020 yang artinya $<$ dari taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, H_3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

4.2.2.1 Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji signifikan (Uji-F) merupakan uji yang digunakan untuk mengukur apakah sebuah variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara serentak atau bersama terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika *probability value* $< 0,05$ maka H_3 diterima dan jika *probability value* $> 0,05$ maka H_3 ditolak. Kriteria pengujian H_4 diterima artinya data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan H_4 ditolak artinya data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen bila $F_{hitung} < F_{tabel}$. Berikut hasil uji simultan (Uji-F) dapat dilihat pada tabel 4.15:

Tabel 4.15 : Hasil Uji Simultan (Uji-F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	133.801	3	44.600	14.991	.000 ^b
	Residual	151.727	51	2.975		
	Total	285.527	54			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem

Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2025.

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, dapat diketahui hasil anova (*analysis of variance*) atau uji-f menunjukkan hasil nilai F_{hitung} sebesar 14,991 lebih besar dari $F_{tabel} = 2,79$ dengan pembilang df pembilang= $k-1 = 4-1= 3$, df penyebut = $n-k= 55-4= 51$ dan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dapat dilihat juga bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir yang artinya H_4 diterima.

4.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan uji yang menggambarkan presentase variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi, yang mengindikasikan seberapa baik model tersebut menjelaskan data (Ghozali, 2018).

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variabilitas dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik dalam menjelaskan variasi

data. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Hasil uji koefisien determinasi bisa dilihat pada tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 ^a	.469	.437	1.725

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2025.

Dari tabel 4.16 diatas menunjukkan hasil bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,437 artinya bahwa terdapat sebanyak 43,7% pengaruh variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Sedangkan, sisanya sebesar 56,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan atau diteliti dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X_1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

Variabel Sistem Pengendalian Internal (X_1) memiliki t_{hitung} 2,563 sedangkan, t_{tabel} 2,00404. Sehingga, $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,563 > 2,00404$) dengan signifikansi untuk

variabel Sistem Pengendalian Internal (X_1) adalah 0,013 yang artinya $<$ dari taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Temuan ini mencerminkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Indikator-indikator SPI yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, secara umum telah diimplementasikan dengan cukup baik.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa pimpinan OPD menunjukkan komitmen terhadap integritas dan etika, serta adanya pemisahan tugas dan prosedur otorisasi yang jelas. Meski demikian, masih terdapat kelemahan dalam pemantauan pengendalian dan dokumentasi proses pengawasan yang belum optimal, sejalan dengan paparan pada latar belakang penelitian bahwa meskipun Kabupaten Indragiri Hilir telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan tahun berturut-turut, namun BPK masih menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang tidak memengaruhi opini, namun dapat berdampak terhadap kualitas substansi laporan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian opini audit yang baik belum sepenuhnya

mencerminkan efektivitas internal control secara menyeluruh, sehingga dibutuhkan upaya penguatan dalam sistem pengendalian internal secara berkelanjutan demi menjaga kualitas laporan keuangan yang lebih andal dan transparan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat meningkat, yang pada akhirnya mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di lingkungan OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Binawati & Rahayu (2021) yang mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan kualitas laporan keuangan. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Gustina (2021) yang menyatakan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan nilai sig. $0,915 > 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima.

4.3.2 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) memiliki t_{hitung} -0,294 sedangkan, t_{tabel} 2,00404. Sehingga, $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,294 < 2,00404$) dengan signifikansi untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) adalah 0,770 yang artinya $>$ dari taraf signifikan 0,05 maka H_0 diterima H_2 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah pada

OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir, meskipun secara administratif SAKD telah diterapkan, namun efektivitasnya ⁴ dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan belum sepenuhnya dirasakan. Berdasarkan indikator kuesioner yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan, sebagian responden menyatakan bahwa proses pencatatan transaksi keuangan telah dilakukan secara sistematis, namun pengikhtisaran dan pelaporan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual. Masih terdapat keterlambatan dalam penyusunan laporan serta kekeliruan dalam klasifikasi akun yang mengindikasikan kurangnya ketelitian dalam proses pelaporan.

Fenomena ini konsisten dengan kondisi yang diuraikan pada latar belakang, di mana meskipun Kabupaten Indragiri Hilir telah berhasil meraih ²² opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan tahun berturut-turut, masih ditemukan kendala teknis dan administratif dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, seperti kurangnya pelatihan dan keterbatasan infrastruktur. Dengan demikian, keberhasilan memperoleh opini audit WTP belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan penerapan SAKD secara substansial di seluruh OPD. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap sistem akuntansi, tidak hanya untuk kepatuhan formal, tetapi juga dalam rangka peningkatan kualitas informasi keuangan secara nyata, agar dapat berkontribusi

lebih nyata dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel di lingkungan OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Kanita (2023), yang mengemukakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Gustina (2021), yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, H_a diterima.

4.3.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3) memiliki t_{hitung} 2,407 sedangkan, t_{tabel} 2,00404. Sehingga, $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,407 > 2,00404$) dengan signifikansi untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3) adalah 0,020 yang artinya $<$ dari taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, H_3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman aparatur dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Kompetensi SDM yang memadai memungkinkan pelaksanaan proses pencatatan, pengolahan, dan penyajian laporan keuangan dilakukan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, SDM yang kompeten juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi dan teknologi, serta lebih teliti dalam menjaga keandalan dan integritas data keuangan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur merupakan faktor penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mispa & Nuramal (2022), yang mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

4.3.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil anova (*analysis of variance*) atau uji-f menunjukkan hasil nilai F_{hitung} sebesar 14,991 lebih besar dari $F^{tabel} = 2,79$ dengan pembilang $df_{pembilang} = k-1 = 4-1 = 3$, $df_{penyebut} = n-k = 55-4 = 51$ dan taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Dapat dilihat juga bahwa tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir yang artinya H_4 diterima. Hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Ketiga faktor ini, mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh satu aspek saja, melainkan merupakan hasil dari sinergi antara pengendalian internal yang efektif, penerapan sistem akuntansi yang tepat, serta kompetensi SDM yang memadai. Ketiganya saling melengkapi dalam memastikan bahwa proses pencatatan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memerlukan perbaikan dan penguatan secara menyeluruh terhadap ketiga faktor tersebut agar tercipta tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Binawati & Nindyaningsih (2021), yang mewakili variabel independen sistem pengendalian internal, Rahayu, & Kanita (2023), yang mewakili variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah dan Mispa & Nuramal (2022), yang mewakili variabel independen kompetensi sumber daya manusia. Tiga peneliti di atas mengemukakan sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hipotesa yang pertama dinyatakan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini membuktikan
2. Hipotesa yang kedua dinyatakan tidak berpengaruh positif dan signifikan antara variabel sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini membuktikan.
3. Hipotesa yang ketiga dinyatakan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini membuktikan.
4. Hipotesa yang keempat dinyatakan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan

daerah dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini membuktikan Ketiga variabel tersebut saling mendukung dan memperkuat dalam membentuk kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kolaborasi antara sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terbukti efektif dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan penambahan variabel lain, seperti Standar Akuntansi Pemerintah, merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penambahan variabel ini memberikan hasil penelitian yang berbeda dari studi sebelumnya serta meningkatkan keterbaruan dan relevansi penelitian di masa mendatang.
2. Bagi OPD Tembilahan diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia agar menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menjadi lebih baik.

3. Bagi Akademis atau Kampus Unisi, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir dan sebagai referensi tambahan di perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- 46 Abdi, H., & Williams, L. J. (2010). Principal Component Analysis, Wiley Interdisciplinary Reviews. Dalam *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics*. Vol. 2, No. 4. <https://doi.org/10.1002/wics.101>
- 20 Afrida, Sitti. (2021). “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir”.
- 15 Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2020). *Auditing and assurance services*. Pearson.
- 7 Ariada, M., & Darmawan, N. A. S. (2023). “Pengaruh sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017–2021)”. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(2), 226–237. <https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2>. ISSN (Print): 2338-6177 | ISSN (Online): 2686-2468
- 5 Astuti, M., Wulandari, R., & Setyowati, S. W. (2024). “Pengaruh sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang”. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(4), 1–8. <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/JAN>. ISSN (Online): 2987-1352
- 23 Baron, A., & Armstrong, M. (2007). *Human Capital Management Achieving Added Value Through People*. Kogan Page. www.kogan-page.co.uk
- 21 Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit: Erlangga.
- 8 Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas SKPD Di Kabupaten Klaten)”. *OPTIMAL*, Vol. 19 No. 1, Hal: 19–39. <https://jurnal.stieiu.ac.id/index.php/opt/article/view/213>
- Dewi, I. G. A. K. (2020). “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali (Studi Empiris Pada Skpd Provinsi Bali) (Doctoral Dissertation, Universitas

- Pendidikan Ganesha)". Jurnal Akuntansi Profesi, Vol. 11 No. 1, Juni 2020. E-ISSN: 2686-2468.
- Efendi, Loli, dkk. (2017). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah)". Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. ISSN. 2502-6976.
- Erlina Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Brama Ardian.
- Fitriani, A. (2023). "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Serta Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)". Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, Vol. 7 Hal. 37-49
- Fitriani, A. D., Eddy, A., & Harimurti, F. (2025). Literatur Review: "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan". YUME: Journal of Management, 8(2), 263-275.
- Ghozali, imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9* (Nomor Badan Penerbit Universitas Diponegoro). Universitas Diponegoro.
- Gustina, I. (2021). "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir". Akuntansi Dan Keuangan, 10 (1). ISSN: 2089-6255, e-ISSN: 2598-7372.
- Hutabri, M. S. (2023). "Kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah". AFRE Accounting and Financial Review, 6(3), 330–336. <https://doi.org/10.26905/afr.v6i3.8401> ISSN (Print): 2598-7763 | ISSN (Online): 2598-7771
- Ikatan Akuntan Indonesia (2012) , tentang neraca. Ikatan Akuntan Indonesia (2017) , tentang Laporan Keuangan. <http://repository.stei.ac.id/pdf>
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten)". Reviu

Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 4(1), 1–16.
<https://doi.org/10.18196/rab.040148>

¹Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Edisi 1). Penerbit: BPFPE.

¹Insirohmawati, P., I. (2024). “*Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di BPPKAD Kabupaten Ponorogo*”. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia. DOI : <https://10.24269/japp.v4i1.6503>.

²³Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). “*Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*”. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. ScienceDirect

⁹Kartika. (2023). “*Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir*”. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 1–13. e-ISSN: 2721-1368.

¹Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

⁵Kementerian Keuangan. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>

³Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Pasal 70 Ayat 1. (2002), *tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)*. <https://peraturan.bpk.go.id>

⁵Machmudiyanti, N. I. (2023). “*Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*”. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 310-330.

¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)*. <https://s.mkri.id>

Mahmudi. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: UII Press.

Mangkunegara, A. P. A. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit: Remaja Rosdakarya.

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru* (Edisi 1). Penerbit: Andi.
- Menteri Dalam Negeri. (2006). *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 23 Ayat 1, tentang pengelolaan keuangan daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Misna. (2021). “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir)”.
- Mispa, S., & Nuramal. (2022). “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”. *YUME : Journal of Management*, 5(2 (2022)), 256–266. <https://doi.org/10.37531/yume.vvix.3456>
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi Edisi IV* (IV). Penerbit: Salemba Empat.
- Mursyidi. (2013). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, tentang *Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005, tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)*. <https://peraturan.bpk.id>
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, tentang *Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/tahun-2016>.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2, *Laporan arus kas*. <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Umum/8>.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2018, *Tujuan laporan keuangan*. <http://repository.stei.ac.id/8446/3/Sidang.pdf>
- Purwaji, Agus,. dkk.2016. *Akuntansi Biaya*. Edisi 2, Jakarta
- Putri, R. D. (2021). “Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Sektor Keuangan yang

14
Terdafar di BEI Tahun 2017-2019". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(5), 22–35.

1
Rahayu, S., & Dewi Kanita, A. (2022). "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Provinsi Dki Jakarta Tahun 2022)". *Jurnal Ekombis Review*, 11(1), 423–432. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>

5
Ramadhani, D., & Halmawati, H. (2023). "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi pada OPD Kabupaten Simalungun". *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 203-215.

Serdamayanti. (2017). *Sumber Daya Manusia*. Penerbit: Refika Aditama.

5
Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang". Vol. 20 No. 2, Hal: 179–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i2.843>

67
Sofyan Syafri Harahap. (2013). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (First Edition). Penerbit: Rajawali.

4
Sudarmanto. (2009). *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Penerbit: Pustaka Pelajar.

4
Sudiaranti, Ni Made. (2015). "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Simposium Nasional Akuntansi 18. Universitas Sumatera Utara, Medan. 16-19 September 2015.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Penerbit: Alfabeta.

41
Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Penerbit: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Edisi 2). Penerbit: Alfabeta.

Syahadatina, Rika dan Ismantika Fitriyana. (2016). "Pengaruh Sumber daya Manusia dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas laporan Keuangan

Pemerintah Daerah". Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 1 No. 1. Universitas Madura.

⁵ Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan diperkuat dengan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>.

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten. <https://peraturan.bpk.go.id/uu-no-12-tahun-1956>.

Wibowo, (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka.

<https://bkd.inhilkab.go.id/> yang diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 08.15 WIB.

<https://djpk.kemenkeu.go.id> yang diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 08.35 WIB.

<https://space.uui.ac.id> yang diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 08. 38 WIB.

<https://mediacenter.inhilkab.go.id/login> yang diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 09.00 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/283952-analisis-terhadap-kinerja-laporan-keuang-f5349979.pdf> yang diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 09.10 WIB.

<https://m.goriau.com/berita/baca/untuk-keempat-kalinya-pemkab-inhil-sukses-raih-opini-wtp.html> Keempat kalinya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sukses raih WTP yang diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 09.15 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id> yang diakses tanggal 1 November 2024 pukul 09.25 WIB.

<https://riau.bpk.go.id> yang diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 09.35 WIB.

<https://setda.inhilkab.go.id> yang diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 09.45 WIB.

<https://siberone.com/news/detail/28072> yang diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 09.55 WIB.

https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2017/lkpp_2017_1527751554.pdf, 2017 yang diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 10.05 WIB.

<https://www.bpk.go.id/2023> yang diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 10.15 WIB.

<https://data.inhilkab.go.id>, yang diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 10.25 WIB.

<https://elibrary.unikom.ac.id> yang diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 10.35 WIB.

<https://media.neliti.com> yang diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 10.45 WIB.

<https://ppid.inhilkab.go.id/> yang diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 10.55 WIB.

<https://pustaka.ut.ac.id> yang diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 12.15 WIB.

<https://warta.bpk.go.id> yang diakses pada tanggal 1 Juli 2025 pukul 09.35 WIB.

<https://www.researchgate.net> yang diakses pada tanggal 1 Juli 2025 pukul 09.45 WIB.

<https://www.bpk.go.id> yang diakses pada tanggal 1 Juli 2025 pukul 10.25 WIB.

PENGANTAR KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu OPD Kabupaten Indragiri Hilir

di –

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi program Studi Akuntansi Universitas Islam Indragiri, bersama ini peneliti bermaksud menyusun penelitian yang berjudul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA OPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan data penelitian sesuai dengan judul tersebut. Adapun identitas dari peneliti:

Nama : Akmalia Natasya

NIM : 102211010029

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi/Akuntansi

Peneliti menyadari sepenuhnya, adanya kuesioner mengganggu aktifitas Bapak/Ibu Kepala Dinas, Kassubag Keuangan dan Bendahara berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner sebagaimana sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat ini. Kuesioner ini hanya untuk keperluan skripsi, tidak untuk dipublikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui

Hormat Saya,

Dosen Pembimbing

.....

AKMALIA NATASYA

A. Identitas Responden

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data, kami memerlukan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai responden. Dimohon Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan mengisi identitas berikut atau memberi tanda *Check List* (✓) pada kotak yang tersedia.

1.	Nama	:						
2.	Jenis Kelamin	:	☐	Laki-Laki				
			☐	Perempuan				
3.	Usia	:						
4.	Pendidikan Terakhir	:	☐	SMP/SMA		☐	Diploma	
			☐	S1	☐	S2	☐	S3
5.	Latar Belakang Pendidikan							
	a. Akuntansi	:	☐					
	b. Manajemen	:	☐					
	c. Ekonomi	:	☐					
	d. Hukum	:	☐					
	e. Teknik	:	☐					
	f. Dan lain-lain	:	☐					
6.	Jabatan	:	☐	Kasubbag Keuangan				
			☐	Bendahara				

⁴
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Cara pengisian kuesioner adalah:

- a. Semua pernyataan dijawab dengan cara memberikan tanda (✓) pada salah satu jawaban yang tersedia dan paling cepat menurut persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i
- b. Tidak ada benar atau salah dalam memberikan jawaban karena kami hanya memperhatikan pada suatu angka atau jawaban yang menunjukkan persepsi terbaik dari Bapak/Ibu/Saudara/i

2. Terdapat beberapa pilihan pernyataan, yaitu:

NILAI	KODE	KETERANGAN
5	ST	⁵ Sangat Setuju
4	S	Setuju
3	KS	Kurang Setuju
2	TS	Tidak Setuju
1	STS	Sangat Tidak Setuju

³ Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Para Pegawai/Staf yang melaksanakan fungsi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.
2. Para Pemegang Kas/Bendahara penerimaan maupun pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir selaku pengambil keputusan dalam menggunakan anggaran dan menggunakan barang.

⁴ Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab pertanyaan penelitian di bawah ini, saya mengucapkan terima kasih.

C. Daftar Pernyataan Kuesioner

1. Kualitas Laporan Keuangan

Daftar Pernyataan tentang Kualitas Laporan Keuangan						
No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
Relevan						
1.	Laporan keuangan yang saya susun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.					
2.	Laporan keuangan yang saya susun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini dan mengoreksi keputusan masa lalu (feedback value).					
Andal						
3.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan					

	keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya.					
4.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					
Dapat Dibandingkan						
5.	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
6.	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.					
Dapat Dipahami						
7.	Laporan yang saya buat disusun secara					

	sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami.					
8.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					

Sumber : Ni Made Sudiarianti, dkk (2015).

2. Sistem Pengendalian Internal

Daftar Pernyataan tentang Sistem Pengendalian Internal						
No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
Lingkungan Pengendalian						
1.	Pimpinan Badan Keuangan Daerah selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian internal.					
2.	Badan Keuangan Daerah telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi.					
Penilaian Risiko						
3.	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.					
4.	Pimpinan selalu memiliki rencana					

	pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.					
Aktivitas Pengendalian						
5.	Kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik atas asset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran uang pada Badan Keuangan Daerah selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas.					
6.	Instansi pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi maupun pengamanan atas asset infrastruktur dan semua transaksi yang diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisasi.					
Informasi dan Komunikasi						
7.	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif.					
8.	Penggunaan anggaran/pemegang kas pada masing-masing Badan Keuangan Daerah					

	telah menyampaikan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) tepat pada waktunya.					
Pemantauan						
9.	Badan Keuangan Daerah selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/review maupun saran yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan/Inspektorat dan sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian internal.					
10.	Pimpinan selalu mereview dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan.					

Sumber: Syahadatina, rika. dkk (2016).

3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Daftar Pernyataan tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah						
No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
Pencatatan						
1.	Penerapan sistem akuntansi keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah saya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).					
2.	Prosedur pencatatan transaksi yang sesuai dengan standar akuntansi pada umumnya.					
3.	Setiap transaksi keuangan didukung oleh bukti transaksi.					
4.	Semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis.					
5.	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja adanya pengklasifikasian terhadap transaksi.					
6.	Setiap transaksi keuangan ditempatkan Bapak/Ibu bekerja dilakukan dengan analisis					

	transaksi/identifikasi transaksi.					
7.	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja dilakukan dengan analisis transaksi/identifikasi transaksi.					
Pengikhtisaran						
8.	Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi.					
9.	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja adanya pembuatan ayat jurnal penyesuaian.					
10.	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja adanya penyusunan neraca lajur atau kertas kerja.					
11.	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja melakukan pembuatan ayat jurnal penutup.					
12.	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja adanya pembuatan neraca saldo setelah penutupan.					
13.	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja adanya pembuatan ayat jurnal pembalik.					
14.	Adanya kedisiplinan dalam pembukuan data keuangan.					

Pelaporan						
15.	Penyusunan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik.					
16.	Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja mampu mempertanggungjawabkan seluruh proses penyusunan laporan keuangan.					

Sumber: Ni Made Sudiarianti, dkk (2015).

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Daftar Pernyataan tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia						
No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
Pengetahuan (Knowledge)						
1.	Saya memahami Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi serta siklus akuntansi dengan baik.					
2.	Saya sering membaca literature berupa jurnal akuntansi dan buku-buku akuntansi dalam rangka meng-upgrade pengetahuan saya dibidang akuntansi.					
Keahlian (Skill)						
3.	Saya mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 64					

	Tahun 2013.					
4.	Saya selalu mengikuti pelatihan terkait dengan penatausahaan laporan keuangan.					
Perilaku (Attitude)						
5.	Saya selalu bekerja berdasarkan praktik yang dapat diterima secara umum dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan.					
6.	Saya selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan.					

Sumber: Ni Made Sudiarianti, dkk. (2015).

LAMPIRAN

Rekapitulasi Tanggapan Responden

Kualitas Layanan Keuangan (Y)													Sistem Pengendalian Internal (X1)													Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)													Kompetensi SDM (X3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Respon dan Penilaian			Pertanyaan										In ah	Pertanyaan			Respon n	Pertanyaan										In ah	Pertanyaan			Respon n	Pertanyaan										In ah	Pertanyaan			Respon n	Pertanyaan										In ah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	4	5	4	5	4	4	4	4	4	24	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

[illegible]

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Pengendalian Internal	55	39	50	43.42	3.740
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	55	63	80	69.69	5.969
Kompetensi Sumber Daya Manusia	55	22	30	25.89	2.424
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	55	33	40	37.16	2.299
Valid N (listwise)	55				

P7	Pearson Correlation	.194	.059	.092	.092	.126	.249	1	.423**	.475**
	Sig. (2-tailed)	.155	.668	.506	.506	.359	.066		.001	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P8	Pearson Correlation	.176	.024	.132	.277*	.285*	.383**	.423**	1	.585**
	Sig. (2-tailed)	.199	.861	.336	.040	.035	.004	.001		.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Kualitas Laporan Penerimaan	Pearson Correlation	.611**	.609**	.645**	.679**	.592**	.516**	.475**	.585**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

B. Sistem pengendalian internal

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Sistem Pengendalian Internal
P1	Pearson Correlation	1	.787**	.723**	.735**	.328*	.550**	.469**	.411**	.624**	.594**	.816**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.015	.000	.000	.002	.000	.000	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P2	Pearson Correlation	.787**	1	.751**	.629**	.334*	.378**	.454**	.383**	.580**	.550**	.773**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.013	.004	.000	.004	.000	.000	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
P3	Pearson Correlation	.723**	.751**	1	.858**	.471**	.428**	.514**	.588**	.662**	.630**	.873**

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.815**	.796**	.789**	.798**	.781**	.806**	.749**	.792**	.813**	.730**	.699**	.581**	.632**	.721**	.731**	.697**	1
	Pearson Correlation																
	Sig. (2-tailed)																
	N																

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

D. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Correlations

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Kompetensi Sumber Daya Manusia
P1	1	.784**	.780**	.390**	.436**	.660**	.853**
	Pearson Correlation						
	Sig. (2-tailed)						
	N						
P2	.55	1	.587**	.511**	.405**	.419**	.778**
	Pearson Correlation						
	Sig. (2-tailed)						
	N						
P3	.780**	.587**	1	.485**	.520**	.604**	.836**
	Pearson Correlation						
	Sig. (2-tailed)						
	N						
P4	.390**	.511**	.485**	1	.630**	.383**	.709**
	Pearson Correlation						
	Sig. (2-tailed)						
	N						
P5	.436**	.405**	.520**	.630**	1	.683**	.776**
	Pearson Correlation						

	Sig. (2-tailed)	.001	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55
Ib	Pearson Correlation	.660**	.419**	.604**	.383**	.683**	.683**	.683**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.004	.000	.000	.000	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55
Kompetensi Sumber Daya Manusia	Pearson Correlation	.853**	.778**	.836**	.709**	.776**	.776**	.797**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas

A. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.730	8

B. Sistem Pengendalian Internal (X₁)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.919	10

C. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂)

Reliability Statistics

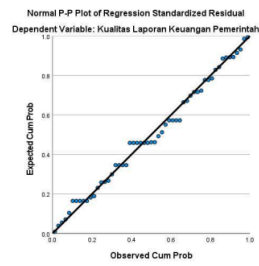
Cronbach's Alpha	N of Items
.947	16

D. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₃)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.880	6

Hasil Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.67623183
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.076
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.512
	99% Confidence Interval	Lower Bound .499
		Upper Bound .525

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1314643744.

Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Sistem Pengendalian Internal	.306	3.273
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.251	3.977
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.512	1.955

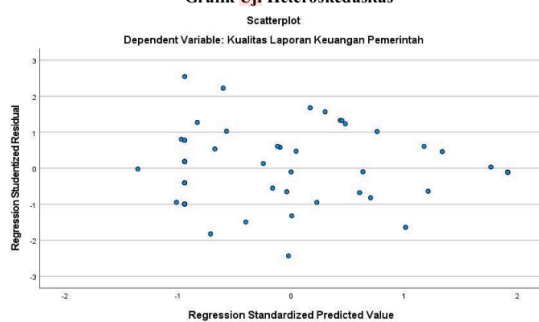
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil Uji Heteroskedasitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t			
1 (Constant)	17.703	2.967		5.967	.000		
Sistem Pengendalian Internal	.291	.114	.473	2.563	.013	.306	3.273
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	-.023	.078	-.060	-.294	.770	.251	3.977
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.326	.135	.343	2.407	.020	.512	1.955

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Grafik Uji Heteroskedasitas



Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17.703	2.967		5.967	.000		
	Sistem Pengendalian Internal	.291	.114	.473	2.563	.013	.306	3.273
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	-.023	.078	-.060	-.294	.770	.251	3.977
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.326	.135	.343	2.407	.020	.512	1.955

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil Uji-T
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17.703	2.967		5.967	.000		
	Sistem Pengendalian Internal	.291	.114	.473	2.563	.013	.306	3.273
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	-.023	.078	-.060	-.294	.770	.251	3.977
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.326	.135	.343	2.407	.020	.512	1.955

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil Uji Simultan (Uji-F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	133.801	3	44.600	14.991	.000 ^b
	Residual	151.727	51	2.975		
	Total	285.527	54			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 ^a	.469	.437	1.725

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Tabel Distribusi Uji F

$\alpha = 0,05$	df1=(k-1)							
df2= (n-k-1)	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161.448	199.500	215.707	224.583	230.162	233.986	236.768	238.883
2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296	19.330	19.353	19.371
3	10.128	9.552	9.277	9.117	9.013	8.941	8.887	8.845
4	7.709	6.944	6.591	6.388	6.256	6.163	6.094	6.041
5	6.608	5.786	5.409	5.192	5.050	4.950	4.876	4.818
6	5.987	5.143	4.757	4.534	4.387	4.284	4.207	4.147
7	5.591	4.737	4.347	4.120	3.972	3.866	3.787	3.726
8	5.318	4.459	4.066	3.838	3.687	3.581	3.500	3.438
9	5.117	4.256	3.863	3.633	3.482	3.374	3.293	3.230
10	4.965	4.103	3.708	3.478	3.326	3.217	3.135	3.072
11	4.844	3.982	3.587	3.357	3.204	3.095	3.012	2.948
12	4.747	3.885	3.490	3.259	3.106	2.996	2.913	2.849
13	4.667	3.806	3.411	3.179	3.025	2.915	2.832	2.767
14	4.600	3.739	3.344	3.112	2.958	2.848	2.764	2.699
15	4.543	3.682	3.287	3.056	2.901	2.790	2.707	2.641
16	4.494	3.634	3.239	3.007	2.852	2.741	2.657	2.591
17	4.451	3.592	3.197	2.965	2.810	2.699	2.614	2.548
18	4.414	3.555	3.160	2.928	2.773	2.661	2.577	2.510
19	4.381	3.522	3.127	2.895	2.740	2.628	2.544	2.477
20	4.351	3.493	3.098	2.866	2.711	2.599	2.514	2.447
21	4.325	3.467	3.072	2.840	2.685	2.573	2.488	2.420
22	4.301	3.443	3.049	2.817	2.661	2.549	2.464	2.397
23	4.279	3.422	3.028	2.796	2.640	2.528	2.442	2.375
24	4.260	3.403	3.009	2.776	2.621	2.508	2.423	2.355
25	4.242	3.385	2.991	2.759	2.603	2.490	2.405	2.337
26	4.225	3.369	2.975	2.743	2.587	2.474	2.388	2.321
27	4.210	3.354	2.960	2.728	2.572	2.459	2.373	2.305
28	4.196	3.340	2.947	2.714	2.558	2.445	2.359	2.291
29	4.183	3.328	2.934	2.701	2.545	2.432	2.346	2.278
30	4.171	3.316	2.922	2.690	2.534	2.421	2.334	2.266
31	4.160	3.305	2.911	2.679	2.523	2.409	2.323	2.255
32	4.149	3.295	2.901	2.668	2.512	2.399	2.313	2.244

33	4.139	3.285	2.892	2.659	2.503	2.389	2.303	2.235
34	4.130	3.276	2.883	2.650	2.494	2.380	2.294	2.225
35	4.121	3.267	2.874	2.641	2.485	2.372	2.285	2.217
36	4.113	3.259	2.866	2.634	2.477	2.364	2.277	2.209
37	4.105	3.252	2.859	2.626	2.470	2.356	2.270	2.201
38	4.098	3.245	2.852	2.619	2.463	2.349	2.262	2.194
39	4.091	3.238	2.845	2.612	2.456	2.342	2.255	2.187
40	4.085	3.232	2.839	2.606	2.449	2.336	2.249	2.180
41	4.079	3.226	2.833	2.600	2.443	2.330	2.243	2.174
42	4.073	3.220	2.827	2.594	2.438	2.324	2.237	2.168
43	4.067	3.214	2.822	2.589	2.432	2.318	2.232	2.163
44	4.062	3.209	2.816	2.584	2.427	2.313	2.226	2.157
45	4.057	3.204	2.812	2.579	2.422	2.308	2.221	2.152
46	4.052	3.200	2.807	2.574	2.417	2.304	2.216	2.147
47	4.047	3.195	2.802	2.570	2.413	2.299	2.212	2.143
48	4.043	3.191	2.798	2.565	2.409	2.295	2.207	2.138
49	4.038	3.187	2.794	2.561	2.404	2.290	2.203	2.134
50	4.034	3.183	2.790	2.557	2.400	2.286	2.199	2.130
51	4.030	3.179	2.786	2.553	2.397	2.283	2.195	2.126
52	4.027	3.175	2.783	2.550	2.393	2.279	2.192	2.122
53	4.023	3.172	2.779	2.546	2.389	2.275	2.188	2.119
54	4.020	3.168	2.776	2.543	2.386	2.272	2.185	2.115
55	4.016	3.165	2.773	2.540	2.383	2.269	2.181	2.112
56	4.013	3.162	2.769	2.537	2.380	2.266	2.178	2.109
57	4.010	3.159	2.766	2.534	2.377	2.263	2.175	2.106
58	4.007	3.156	2.764	2.531	2.374	2.260	2.172	2.103
59	4.004	3.153	2.761	2.528	2.371	2.257	2.169	2.100
60	4.001	3.150	2.758	2.525	2.368	2.254	2.167	2.097
61	3.998	3.148	2.755	2.523	2.366	2.251	2.164	2.094
62	3.996	3.145	2.753	2.520	2.363	2.249	2.161	2.092
63	3.993	3.143	2.751	2.518	2.361	2.246	2.159	2.089
64	3.991	3.140	2.748	2.515	2.358	2.244	2.156	2.087
65	3.989	3.138	2.746	2.513	2.356	2.242	2.154	2.084
66	3.986	3.136	2.744	2.511	2.354	2.239	2.152	2.082
67	3.984	3.134	2.742	2.509	2.352	2.237	2.150	2.080
68	3.982	3.132	2.740	2.507	2.350	2.235	2.148	2.078

69	3.980	3.130	2.737	2.505	2.348	2.233	2.145	2.076
70	3.978	3.128	2.736	2.503	2.346	2.231	2.143	2.074
71	3.976	3.126	2.734	2.501	2.344	2.229	2.142	2.072
72	3.974	3.124	2.732	2.499	2.342	2.227	2.140	2.070
73	3.972	3.122	2.730	2.497	2.340	2.226	2.138	2.068
74	3.970	3.120	2.728	2.495	2.338	2.224	2.136	2.066
75	3.968	3.119	2.727	2.494	2.337	2.222	2.134	2.064
76	3.967	3.117	2.725	2.492	2.335	2.220	2.133	2.063
77	3.965	3.115	2.723	2.490	2.333	2.219	2.131	2.061
78	3.963	3.114	2.722	2.489	2.332	2.217	2.129	2.059
79	3.962	3.112	2.720	2.487	2.330	2.216	2.128	2.058
80	3.960	3.111	2.719	2.486	2.329	2.214	2.126	2.056
81	3.959	3.109	2.717	2.484	2.327	2.213	2.125	2.055
82	3.957	3.108	2.716	2.483	2.326	2.211	2.123	2.053
83	3.956	3.107	2.715	2.482	2.324	2.210	2.122	2.052
84	3.955	3.105	2.713	2.480	2.323	2.209	2.121	2.051
85	3.953	3.104	2.712	2.479	2.322	2.207	2.119	2.049
86	3.952	3.103	2.711	2.478	2.321	2.206	2.118	2.048
87	3.951	3.101	2.709	2.476	2.319	2.205	2.117	2.047
88	3.949	3.100	2.708	2.475	2.318	2.203	2.115	2.045
89	3.948	3.099	2.707	2.474	2.317	2.202	2.114	2.044
90	3.947	3.098	2.706	2.473	2.316	2.201	2.113	2.043
91	3.946	3.097	2.705	2.472	2.315	2.200	2.112	2.042
92	3.945	3.095	2.704	2.471	2.313	2.199	2.111	2.041
93	3.943	3.094	2.703	2.470	2.312	2.198	2.110	2.040
94	3.942	3.093	2.701	2.469	2.311	2.197	2.109	2.038
95	3.941	3.092	2.700	2.467	2.310	2.196	2.108	2.037
96	3.940	3.091	2.699	2.466	2.309	2.195	2.106	2.036
97	3.939	3.090	2.698	2.465	2.308	2.194	2.105	2.035
98	3.938	3.089	2.697	2.465	2.307	2.193	2.104	2.034
99	3.937	3.088	2.696	2.464	2.306	2.192	2.103	2.033
100	3.936	3.087	2.696	2.463	2.305	2.191	2.103	2.032

Tabel R Untuk DF = 1 – 50

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189

36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

Tabel R Untuk DF = 51 – 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468

86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

ORIGINALITY REPORT

35%

SIMILARITY INDEX

31%

INTERNET SOURCES

22%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	7%
2	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	5%
3	ojs.selodangmayang.com Internet Source	4%
4	repository.upstegal.ac.id Internet Source	4%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
6	eprints.uny.ac.id Internet Source	2%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
8	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
9	Nur Waina Fattah, Ratna Ayu Damayanti, Muhammad Istiyansyah Ulman Idris. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH", APSSAI ACCOUNTING REVIEW, 2023 Publication	1%

10	Submitted to Indiana University Student Paper	1 %
11	positori.utu.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	1 %
13	Amila Syaliha. "Tugas Proposal Penelitian Akuntansi Keperilakuan Amila Syaliha (18.121.031) A1 Universitas Yapis Papua", Open Science Framework, 2021 Publication	1 %
14	Fatimah Zohra Yahya, Amir Lukum, Lukman Pakaya. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", Jambura Accounting Review, 2025 Publication	1 %
15	Tathya Pradipta, R Budi Hendaris. "PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2025 Publication	<1 %
16	Submitted to Ajou University Graduate School Student Paper	<1 %
17	Submitted to Walters State Community College Student Paper	<1 %

18

Novtania Mokoginta, Linda Lambey, Winston Pontoh. "PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017

Publication

<1 %

19

Putri Alminanda, Marfuah Marfuah. "PERAN KOMITMEN ORGANISASI DALAM MEMODERASI PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH", Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 2018

Publication

<1 %

20

Gratiana D.H.D Puspita, Apner Siang, Taufik Rachman, Alfida Dogopia. "Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Menentukan Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Jayapura", Journal on Education, 2023

Publication

<1 %

21

Angga Permadi Kapriana, Iskandar Agung. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI PEMODERASI (STUDI EMPIRIS PADA OPD DI KABUPATEN KUBURAYA)", JAAKFE UNTAN

<1 %

-
- 22 - Jarina, Eka Sariningsih, Apip Alansori.
"Analisis Variabel-Variabel Yang
Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan
Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)",
Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen
Malahayati (JRAMM), 2024

Publication

-
- 23 Hurriyati Ratih, Tjahjono Benny,
GafarAbdullah Ade, Sulastri, Lisnawati.
"Advances in Business, Management and
Entrepreneurship", CRC Press, 2020

Publication

-
- 24 Submitted to STIE Perbanas Surabaya

Student Paper

-
- 25 I Wayan Juniarta, Gde Herry Sugiarto Asana.
"PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PENERAPAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GIANYAR", Journal Research of
Accounting (JARAC), 2020

Publication

-
- 26 Fakultas Hukum, KMS Novyar Satriawan Fikri.
"PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIIL (STUDI DI KABUPATEN

INDRAGIRI HILIR)", Open Science Framework, 2021

Publication

27	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman	<1 %
	Student Paper	

28	Nisrina Luthfita Tsany, Fatchan Achyani. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi dan Kecerdasan Emosional pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen", Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2025	<1 %
	Publication	

29	Ratna Sari. "Tugas Proposal Penelitian Akuntansi Keperilakuan Ratna Sari (18.121.018) A1 Universitas Yapis Papua", Open Science Framework, 2021	<1 %
	Publication	

30	I Putu Santika, I Ketut Mustika, Ni Luh Kuni Hari. "PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN", Journal of Applied Management Studies, 2022	<1 %
	Publication	

31	Ninda Riskia Putri, Agustiawan Agustiawan. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Kabupaten Kampar)",	<1 %
----	---	------

32

M ZIQRY RAMADHAN, Nurabiah Nurabiah.
"PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DENGAN KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL
MODERASI (Studi Empiris pada OPD BPKAD
Pemerintahan Kota Bima)", *Bisnis-Net Jurnal
Ekonomi dan Bisnis*, 2024

Publication

33

Rizkiyah Lestari Utami, Yudi -, Misni Erwati.
"Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya
Manusia, Sistem Pengendalian Intern
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo",
*Indonesian Journal of Islamic Economics and
Business*, 2023

Publication

34

Submitted to Universitas Papua

Student Paper

35

Nurfiyani Dyah Pramesti, Anita Damajanti.
"FAKTOR PENENTU KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI
KABUPATEN SEMARANG", *Solusi*, 2022

Publication

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

36 Suarni, Marlina. "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PADANG SATU", INA-Rxiv, 2019

Publication

<1 %

37 Irmawati Tangko, Syaikhul Falah, Bill J. C. Pangayow. "PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG", Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset, 2019

Publication

<1 %

38 Irwan Trinugroho, Evan Lau. "Business Innovation and Development in Emerging Economies", CRC Press, 2019

Publication

<1 %

39 Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1 %

40 R. Kapila, S. Saber, R.K. Verma, G. Blanco, V.K. Eggers, J.L. Fierst. "Outcrossing Complicates Mutation Purging by Trapping Single Nucleotide Polymorphisms in Structural Variant Mutations", Cold Spring Harbor Laboratory, 2025

Publication

<1 %

41 Hanoi National University of Education

Publication

<1 %

42

A.H.G. Kusumah, C.U. Abdullah, D. Turgarini,
M. Ruhimat, O. Ridwanudin, Y. Yuniawati.

"Promoting Creative Tourism: Current Issues
in Tourism Research", CRC Press, 2021

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off